

SKRIPSI
ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ANAK
PUTUS SEKOLAH DI KECAMATAN LIUKANG TANGAYA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

OLEH
ASKAR PURWANTO
4512103101

UNIVERSITAS

BOSOWA



PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BOSOWA

2018

SKRIPSI

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI ANAK
PUTUS SEKOLAH DI KECAMATAN LIUKANG TANGAYA
KABUPATEN PANGKAJENE

Disusun dan diajukan oleh

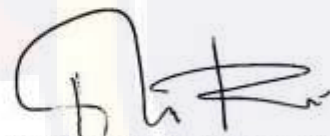
ASKAR PURWANTO
NIM 4512103101

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi
pada tanggal 23 Maret 2018

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Sundari Hamid, S.Pd., M.Si.
NIDN. 0924037001



Susalti Nur Arsyad, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0906098803

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Ketua Program Studi
Pendidikan Guru Sekolah Dasar,



Dr. Mas'ud Muhammadiyah, M.Si.
NIK.D. 450 096



St. Muriati, S.Pd., M.Pd.
NIK. D. 450 437

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Anak
Putus Sekolah Di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan.

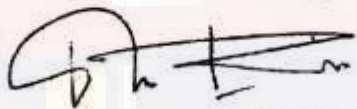
Nama : Askar Purwanto

NIM : 4512103101

Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Sundari Hamid, S.Pd.M.Si.
NIDN. 09247001

Pembimbing II

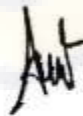


Susalti Nur Arsyad, S.Pd.M.Pd.
NIDN. 0906098803

Mengetahui

Ketua

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar



St. Muryati, S.Pd. M.Pd
NIDN. 0909098801

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini benar-benar karya saaya sendiri. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Tanda tangan dosen penguji yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli, jika tidak asli saya akan menerima sanksi ditunda yudisium pada periode berikutnya.

Makassar 22 Maret 2018

Yang menyatakan



Askar Purwanto
NIM.4512 103 101

MOTTO

Di dunia ini ada dua jenis manusia yang pertama manusia yang hanya taunya lari dari kenyataan (pengecut), dan yang kedua 'manusia yang tabah dalam menghadapi segala tantangan yang menghadang, tanpa ada keluh sedikitpun yang keluar dari mulutnya, ingat dalam kompetisi hanya ada seorang yang menjadi pemenang, yaitu dia yang mampu bertahan sampai titik akhir, jadi tergantung dari kalian mau menjadi pemenang dan lepas dari gelar seorang pengecut atau menjadi seorang pengecut.

BADAI PASTI BERLALU DAN YANG BERTAHAN YANG MENANG



ABSTRAK

Askar Purwanto. 4512103101. Analysis of Local Government Role of Children Out of School in Liukang Tangaya. Under Guidance are 1, Dr. Sundari Hamid, S.Pd, M.Si. and Advisor 2, Susalti Nur Arsyad, S.Pd, M.Pd.

This research was made to : (1) know and analyze district government role to push drop out of school children rate in Liukang Tangaya district; (2) descriptive caused factors of drop out of school children in Liukang Tangaya district.

This research used qualitative approach with descriptive type. Informant of this research was Vice regent of Liukang Tangaya, Chief and staff of Educational Unit of Liukang Tangaya district, Unit Task of Educational Unit, School in primary I, in sub district Liukang Tangaya, and also society. Data was taken by depth interview, observation and documentation as long as one month in field. Analysis data used descriptive qualitative.

The result of research showed that : (1) effort of district government role to push children drop out of school rate in Liukang Tangaya district which were to legalized wisdom in educational side, education financial aim, giving scholarship to poor society, poor student aim programme (BSM), and socialize to society; (2) based on case that have been found by researcher, caused factor of drop out children of school was lack of children interest to school, family condition that was unhappy, weak of family economy, the condition of the child's environment, people's views on education.

Key words: district government, drop out children of school

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat kesehatan dan hikmat kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Penulisan skripsi dengan judul “Analisis Peranan Pemerintah Daerah terhadap Anak Putus Sekolah di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan” merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bosowa. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw. Manusia pilihan terbaik dalam peradaban zaman dikarenakan perjuangan beliau membawa panji risalah suci Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang bertaburkan aroma bunga firdaus. Semoga suritauladan beliau senantiasa mewarnai dan menafasi segala derap langkah dan aktivitas kita. Serta selalu doa yang teriring oleh kedua orang tua penulis sehingga penulis bisa seperti ini sampai sekarang, teruntuk Ayahanda tercinta, Sahdan yang telah mendidik serta membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Dan untuk ibunda tercinta Hapipa yang telah melahirkan dan membesarkan penulis sampai saat ini. Penulis bukanlah apa-apa tanpa kalian. Semoga

Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada beliau. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan inimasih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun yang berguna untukpenyempurnaan selanjutnya. Penulis telah banyak menerima masukan,bimbingan dan bantuan selama penulis mengikuti perkuliah di Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Prodi Ilmu Pendidikan Fkip Universitas Bosowa. Oleh sebab itu padakesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Bosowa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada program S1 Universitas Bosowa .
2. Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bosowa beserta seluruh stafnya.
3. St. Muriati, S.Pd, M.Pd selaku ketua jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan segenap Dosen pengajar dan staf pegawai di lingkungan FKIP Universitas Bosowa, khususnya yang pernah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.
4. Ibu Dr. Sundari Hamid, S.Pd, M.Si. selaku pembimbing 1 dan Ibu Susalti Nur Arsyad, S.Pd, M.Pd. selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.

5. Terima Kasih untuk segala pihak yang terlibat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Liukang Tangaya, dan para informan serta pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan semua yang sudah membantu dan memberikan kontribusi kepada penulis selama penyusunan skripsi.
6. Terima kasih yang tak terhingga untuk nenek St. Rabaiah selaku Motivator Hidup penulis, yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil penulis sangat bangga terhadap anda terlebih lagi penulis sangat menyayangi anda.
7. Terima Kasih untuk sahabat-sahabat semasa sekolah di SMAN 1 Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan untuk teman-teman di jurusan PGSD 012, HIMALAYA, MAPALA 45, HMI, KMP3, KSR 45, Gerakan Sosial Indonesia, Jaringan Kemanusiaan, Terimakasih untuk waktu kalian untuk mengukir sedikit cerita dari kebersamaan kita di masa yang sangat bersejarah menurut penulis.
8. Terima kasih untuk orang-orang konyol yang telah lama mengenal penulis. Sahabat yang telah menjadi saudara bagi penulis, Seven, Miswar, Mahadir, Sakaria, Hakim, Akbar, Sulfi, Iqbal, Edi, Simson, St. Saenab, Irmayanti, Ira Wati, Ifa, Mila, Hirul, Jusri, Lela, Haisa, Rafli, Hairul, Hamka, Qalbi, Ina dan

teman-teman yang belum penulis sebutkan, semoga kalian semua cepat mendapatkan pekerjaan, terlebih lagi cepat mendapat pasangan sesuai harapan kalian.

9. Kawan-Kawan di Pondok Skarda Amiluddin, Sudirman, Syamsuddin, Amris, Kak Tamrin, Sopian, Suharti, adik Pikki .Terima Kasih telah menjadi keluarga dan saudara yang baik walaupun dalam waktu yang singkat. Akhirnya segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi karunia yang tidak terhingga dalam hidupnya. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti hal yang sama.

Sekian dan Terima Kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 23 Juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iii |
| MOTTO..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pembahasan Teori..... | 8 |
| B. Kerangka Pikir..... | 39 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | |
| A. Tempat dan Waktu Penelitian | 40 |
| B. Jenis dan Desain Penelitian | 40 |
| C. Variabel dan Defenisi Operasional Variabel | 41 |

| | |
|--|----|
| D. Populasi dan Sampel | 42 |
| E. Instrumen Penelitian | 44 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 43 |
| G. Teknik Analisis Data | 46 |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil Penelitian | 47 |
| B. Pembahasan | 83 |
| BAB V. PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 89 |
| B. Saran | 90 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 92 |
| LAMPIRAN | 96 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

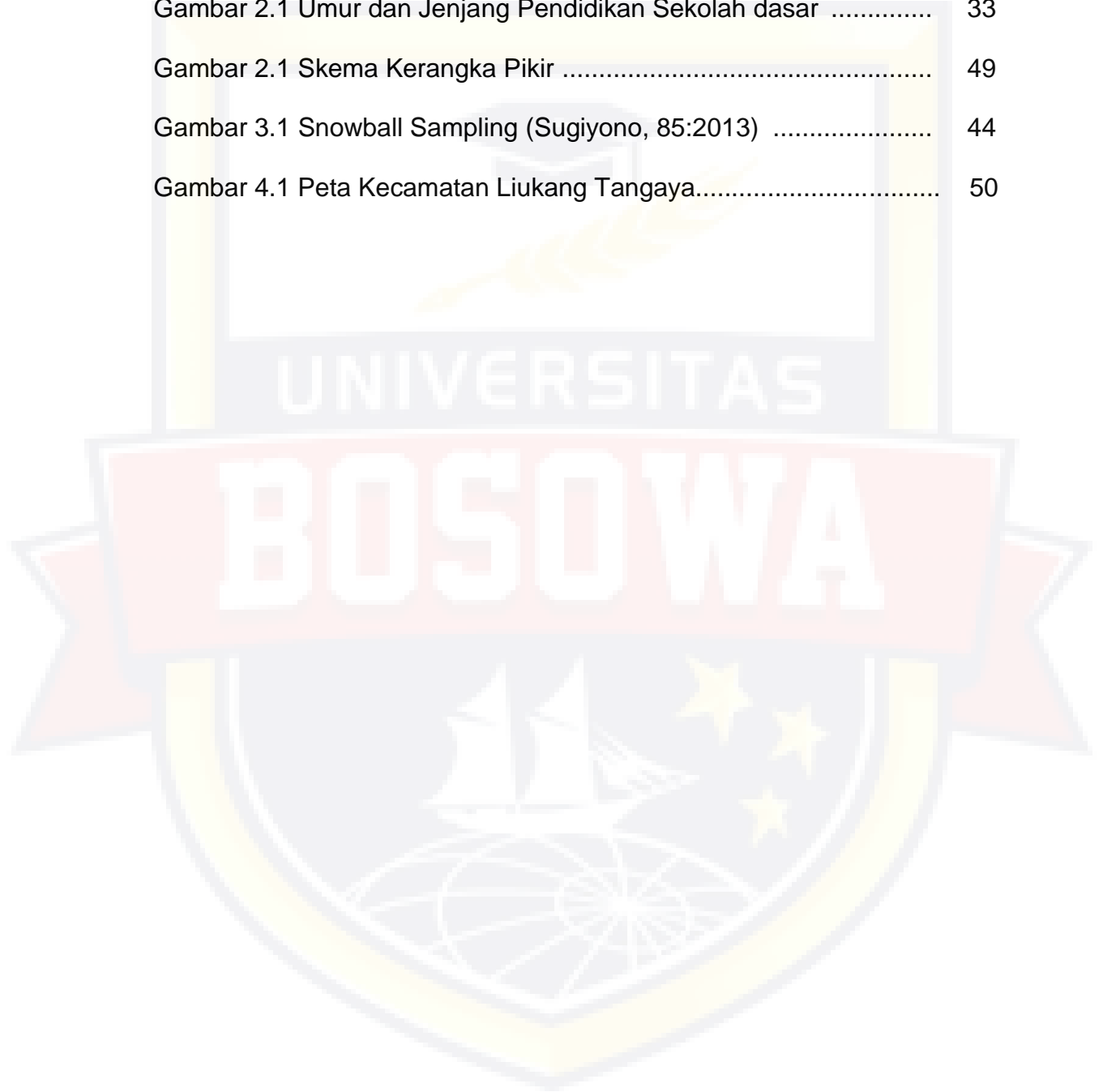
DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|-----------|
| Tabel 4.1 Jarak Pulau-Pulau Di Kecamatan Liukang Tangaya | 50 |
| Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Liukang Tangaya Menurut Jenis Kelamin Tiap Desa/Kelurahan | 52 |
| Tabel 4.3 Kondisi Anak Putus Sekolah di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep tingkat SD | 64 |
| Tabel 4.4 Perbandingan Anak Sekolah dan Anak Putus Sekolah di Kec. Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep tingkat SD Tahun 2016 | <u>77</u> |



DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 2.1 Umur dan Jenjang Pendidikan Sekolah dasar | 33 |
| Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir | 49 |
| Gambar 3.1 Snowball Sampling (Sugiyono, 85:2013) | 44 |
| Gambar 4.1 Peta Kecamatan Liukang Tangaya..... | 50 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi (Pasal 1 ayat 8 UU nomor 23 Tahun 2014).

Berdasarkan asas desentralisasi tentunya pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah kini lebih leluasa dalam mengelolah serta meningkatkan potensi yang di miliki daerahnya termasuk sumber daya manusia. Sehingga pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam menjamin hak masyarakatnya, dikarenakan pemerintah daerah yang lebih dekat secara wilayah serta memahami dan mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakatnya, dalam hal ini kebutuhan dasar masyarakat yakni di bidang pendidikan. Hal ini tentunya sesuai dengan peranan pemerintah sebagai edukasional yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam membangkitkan kemampuan

dan kesadarannya dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya dengan ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini pendidikan merupakan suatu kebutuhan primer, dimana orang-orang berlomba untuk dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin dan untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS). Hal ini dilakukan agar dapat mengarungi kehidupan yang serba canggih dan dapat mengikuti kuatnya pengaruh globalisasi yang merambah seluruh bidang kehidupan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendidikan sebagai salah satu investasi masa depan adalah suatu usaha yang sangat memegang peranan penting. Pendidikan akan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi orang-orang yang cerdas dan dapat memanfaatkan seluruh kesempatan dalam memenuhi dan memperjuangkan kehidupan. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang tidak mengenyam pendidikan akan menjadi budak globalisasi, yang mengombang-ambingkan kehidupannya dalam ketidak mampuan baik secara moril dan materil.

Keberhasilan suatu Negara banyak tergantung pada kemajuan tingkat pendidikanya, di Indonesia sendiri banyak dijumpai berbagai masalah yang berkaitan dengan pendidikan, misalnya saja adalah putus sekolah. Hal ini juga sejalan dengan amanat yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada salah satu butir yang tercantum disana dijelaskan bahwa adanya pencerdasan

kehidupan bangsa, jelas ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang besar. Bagaimana respon pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi hal tersebut, karena secara tidak langsung orang yang tidak menyenangi pendidikan ataupun sudah dapat menyenangi akan tetapi putus di tengah jalan. Bisa saja berasal dari anak-anak yang cerdas, bahkan sebaliknya. Akan tetapi terlepas dari hal itu, harus mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya. Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan utama yang tak dapat dikesampingkan, sebab pendidikan akan membentuk sikap mental manusia kepada perilaku budi pekerti luhur yang dapat membentuk keperibadian utama. Hal ini jelas telah di amanatkan oleh UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pengelolaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasi ke system desentralisasi. Desentralisasi pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan (Abdul Halim, 2001:15).

Desentralisasi pendidikan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang di bidang pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh unit atau pejabat pusat kepada unit atau pejabat di bawahnya, atau dari pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah, atau dari pemerintah kepada masyarakat. Salah satu wujud dari desentralisasi ialah terlaksananya proses otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dapat diartikan bahwa program desentralisasi pendidikan dengan kewenangan dan sumber dana finansial yang lebih besar merupakan jalan terang bagi pemerintahan kabupaten dan kota dalam menyikapi segala permasalahan yang ada, baik itu dalam pemerintahan, maupun dalam bidang pendidikan. Pemerintah Kabupaten dan Dinas Pendidikan dapat membuat program-program dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Serta mendorong terjadinya proses otonomi baik pada pemerintah daerah maupun pada setiap satuan pendidikan agar memiliki kemampuan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, adil dan merata bagi setiap masyarakat.

Agar setiap daerah dapat menyelenggarakan pendidikan secara merata dan relatif tidak ketinggalan jauh dari daerah-daerah lainnya, anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) di antaranya yang disalurkan melalui berbagai skema akan berfungsi sebagai faktor penyeimbang sehingga masyarakat di setiap daerah dapat menerima pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan adil.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebenarnya sudah mengamanatkan tentang pentingnya alokasi anggaran dana untuk pembiayaan dan pembangunan pendidikan ini.

Dalam pasal 49 ayat (1) dikemukakan bahwa “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, amanat yang jelas-jelas memiliki dasar dan payung hukum tersebut dengan berbagai dalih dan alasan belum terlaksana secara maksimal, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengenyam pendidikan di bangku sekolah.

Data Dinas Pendidikan menunjukkan masih adanya kondisi anak putus sekolah yang terjadi di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan setiap tahunnya menjadi ironi bagi pemerintah daerah, dimana kondisi anak putus sekolah pada tahun 2014 mencapai angka 203 anak. Kondisi demikian dapat dimaknai bahwa masih adanya anak usia sekolah yang belum bersekolah. Kondisi anak putus sekolah untuk anak usia sekolah tentunya sangat memprihatinkan. Kondisi anak putus sekolah sendiri dapat disebabkan oleh berbagai faktor.

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bertanggung jawab dalam menjamin dan memenuhi hak dasar masyarakat akan layanan dan peningkatan pendidikan untuk menjamin hak setiap masyarakat untuk mengenyam pendidikan, demi menciptakan masyarakat yang berkualitas maju, mandiri, dan sejahtera dengan membangun keunggulan komparatif di masing-masing wilayah dan

didukung oleh kapasitas SDM yang berkualitas, sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Olehnya itu, bertolak dari latar belakang di atas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Peran Pemerintah Daerah Terhadap Anak Putus Sekolah di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan beberapa rumusan masalah mengenai Analisis Peranan Pemerintah Daerah terhadap Anak Putus Sekolah di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara singkat sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah di Kecamatan LiukangTangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya anak putus sekolah diKecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam menekan angka anak-anak putus sekolah di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya anak putus sekolah di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian, maka hasil penelitian diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan kemajuan ilmu, khususnya kajian ilmu pendidikan yang berkaitan dengan peranan pemerintah daerah terhadap anak putus sekolah.
2. Hasil penulisan ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan dalam pendidikan terutamadalam mengatasi anak putus sekolah.
3. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat untuk bisa lebih mandiri dan terus mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembahasan Teori

1. Tinjauan Tentang Analisis

Teori analisis menurut para ahli memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam menciptakan suatu penemuan atau solusi akan sebuah permasalahan. Peran analisis juga ditujukan untuk melakukan deteksi apabila terdapat suatu kejanggalan atau penemuan khusus dalam suatu penelitian. Melalui analisis data, langkah penyelesaian suatu masalah pun dapat diketahui.

Menurut Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty, (2002:52), teori analisis merupakan uraian atas sebuah pokok permasalahan sesuai dengan penelitian atau hasil observasi yang telah dilakukan. Menganalisis merupakan “Pengurian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. Dengan demikian, berdasarkan ciri-ciri tersebut, pengertian analisis adalah sebagai suatu tindakan untuk menjawab permasalahan berdasarkan observasi, pengolahan data, dan akhirnya penarikan kesimpulan, sehingga penyelesaian dari permasalahan tersebut dapat diketahui dengan tepat.

Dalam penelitian kualitatif proses analisis dan interpretasi data memerlukan cara berpikir kreatif, kritis dan sangat hati-hati. Kedua

proses tersebut merupakan proses yang saling terkait dan sangat erat hubungannya.

Menurut Ardhana dalam Lexy J. Moleong 2002:103 Analisis data merupakan proses untuk pengorganisasian data dalam rangka mendapatkan pola-pola atau bentuk-bentuk keteraturan. Sedangkan interpretasi data adalah proses pemberian makna terhadap pola-pola atau keteraturan-keteraturan yang ditemukan dalam sebuah penelitian. Data yang terkumpul diharapkan dapat merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Proses penyusunan data dapat berbeda-beda antar peneliti tergantung selera, pengalaman, dan kreatifitas berfikir sehingga data yang terkumpul dapat mempengaruhi pemilihan analisis data.

Menurut Sugiyono (2011:224), Dalam penelitian kualitatif tidak ada formula yang pasti untuk menganalisis data seperti formula yang dipakai dalam penelitian kuantitatif. Namun, pada dasarnya terdapat beberapa kesamaan langkah yang ditempuh untuk menganalisis dan interpretasi data.

Proses analisis data diawali dengan menelaah seluruh data yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan lapangan, dan kajian dokumen (pustaka). Langkah berikutnya reduksi data yang dilakukan dengan cara abstraksi. Abstraksi merupakan upaya membuat rangkuman dari segala data yang ada. Kemudian, menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-

satuan ini dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Pengkategorian ini dilakukan dengan cara koding. Langkah terakhir, penafsiran data yang telah diuji (verifikasi) untuk dijadikan beberapa metode tertentu.

2. Fungsi Analisis

Sebagai suatu komponen dalam menyelesaikan suatu permasalahan, Soerjono Soekanto, (2002) analisis memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Untuk mengidentifikasi ciri-ciri permasalahan yang dihadapi, sehingga nantinya dapat diketahui langkah-langkah penyelesaiannya secara tepat dan sesuai.
- b. Untuk memberikan spesifikasi atau keterangan terperinci mengenai objek permasalahan yang dianalisis.
- c. Memberikan gambaran dasar mengenai simpulan dan strategi yang akan dilakukan.

Secara umum, proses analisis berfungsi sebagai media menemukan alternatif atau gambaran dasar penyelesaian atas masalah yang diteliti. Selain itu, penguraian data atau keterangan di dalam tindakan analisis harus dilakukan secara teliti dan hati-hati karena hasil analisis akan sangat mempengaruhi kesimpulan dan solusi atas masalah tersebut. Jadi, ulasan teori analisis dapat disimpulkan sebagai dasar atas perancangan suatu sistem yang dilakukan dengan cara sistematis, teliti, dan objektif.

3. Tinjauan Tentang Peranan

Berdasarkan kamus ilmiah populer yang disusun oleh Tim Prima Pena memberikan pengertian peran dan peranan sebagai berikut:

“Peran” yakni laku; hal berlaku atau bertindak; pemeran, pelaku; pemain *film* atau drama. Sedangkan peranan adalah fungsi, kedudukan; bagian kedudukan.”

Berbicara tentang peranan, maka kita tidak menghindarkan diri dari persoalan status atau kapasitas seseorang atau suatu lembaga karena setiap status sosial atau jabatan yang diberikan kepada setiap orang atau kepada suatu institusi pasti disertai dengan kewenangan. Kewenangan atau peran yang harus dilaksanakan oleh orang atau institusi tersebut. Menurut “Selo Sumardjono (1974)” peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kehidupan (*status*) atau pola tingkah laku yang ada hubungannya dengan kehidupan sosial seseorang, antara *status* dan *role* sangat sukar dipisahkan. Tidak ada kedudukan tanpa peran, dan tidak ada peran tanpa kedudukan.

Menurut pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, menyebutkan pengertian peranan sebagai berikut:

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka dia adalah pemain sandiwara atau pemain utama;

b. Peran adalah bagian yang dimainkan seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang dibebankan kepadanya;

c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Lebih lanjut lagi, M. Rusli Karim (1991:70) memberikan batasan tentang peran di antaranya sebagai berikut:

- 1) Peran adalah norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam kehidupan masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku penting bagi struktur sosial.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran Soekamto (1984:237). Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu :

- a. Ketentuan peranan
- b. Gambaran peranan
- c. Harapan peranan

Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdaya, dan pengatur masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sarjono Sukamto, (1984) bahwa peranan adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hal-hal serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan. Menilik dari beberapa pernyataan mengenai peranan diatas tergambar bahwa peranan menyangkut pelaksanaan sebuah tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk berprakarsa dalam tugas dan fungsinya. Hal lain yang menggambarkan mengenai peranan, adalah Horoe poetri, Arimbi dan Santosan (2003), yang mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*).
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai *instrumen* atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilam keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang *responsif* dan *responsibel*.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biasess*).
- e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya "mengobati" masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan (*sense of power lessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Menurut Toha (1983:10) pengertian peranan dapat dijelaskan bahwa “suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.” Selanjutnya menurut Thoha (1983 : 80) “Dalam bahasa organisasi peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan“. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban dalam suatu organisasi diwujudkan dalam bentuk uraian jabatan atau uraian tugas. Oleh karena itu, maka dalam menjalankan peranannya seseorang/lembaga, uraian tugas/uraian jabatan merupakan pedomannya.

Soekanto (1994:261) membedakan peranan dalam dua bagian yakni “peranan yang melekat pada diri seseorang dan peranan yang melekat pada posisi tepatnya dalam pergaulan masyarakat”. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan”. Menyimak pendapat tersebut dapat ditarik beberapa pokok pikiran mengenai peranan yaitu adanya kedudukan yang bersifat *statis*, adanya hak dan kewajiban serta adanya hubungan timbal-balik antara peranan dan kedudukan.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa istilah peranan mengandung beberapa pengertian, antara lain :

- a. Peranan adalah suatu konsep perilaku,
- b. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi/kedudukan seseorang dalam masyarakat, dan
- c. Peranan dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan berkaitan dengan hak dan kewajiban.

Melihat dari beberapa pengertian peranan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peranan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dibebankan kepadanya yang sesuai dengan tanggung jawab organisasi tersebut, untuk dapat melaksanakan sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Tinjauan tentang Pemerintah Daerah

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan “pe” menjadi kata “pemerintah” yang berarti badan atau organ *elit* yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Secara ilmiah, pengertian pemerintah dapat dibedakan dalam dua Pengertian yaitu pemerintah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan perintah sebagai fungsi dari pada pemerintah. Istilah pemerintah dalam organ dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan

pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara dan pemerintah dalam arti sempit adalah kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif. Menurut Kansil (1984:21).

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003:6) pemerintah adalah : Organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan *civil* bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang di perintah. Dalam hubungan itu sah (*legal*) dalam wilayah Indonesia, berhak menerima layanan *civil* tertentu dan pemerintah wajib melayaninya.

Sementara Inu Kencana Syafi'ie, (2001:46), menjelaskan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus (*process*), wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*), dan cara, metode serta system (*manner, method, and system*), dari pemerintah terhadap masyarakatnya.

Menurut Montes Q uieu dalam Salam, (2004:35) pemerintah adalah seluruh lembaga negara yang biasa dikenal dengan nama *trias politica* baik itu legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan undang-undang). Pemerintah adalah organ yang

berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan *civil* bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan yang (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (*lega*) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan *civil* (sipil) tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya. Baik pemerintah maupun yang diperintah berada pada berbagai posisi dan melakukan berbagai peran satu terhadap yang lain, baik timbal balik maupun searah, seimbang maupun tidak. Hal inilah yang membentuk hubungan pemerintahan. Berbagai konsep tentang pemerintah antara lain:

- a. Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga Negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.
- b. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga Negara yang oleh konstitusi Negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini telah diatur dalam UUD 1945, di mana dinyatakan bahwa Kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Bahkan kepada presiden dilimpahkan "*concentration of power and responsibility* (terpusat pada kekuasaan dan tanggung jawab)".

c. Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan Negara pada tingkat pusat (tertinggi); pada umumnya dihadapkan pada konsep pemerintah daerah.

d. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah. Berbeda dengan pemerintah pusat yang dianggap mewakili Negara, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.

Syafi; ie (2004:5) dalam bukunya yang terkenal *Comparative Government*, mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (*process*), harus mempunyai Negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), mempunyai pejabat pemerintah (*the duty*) dan mempunyai cara, metode, serta sistem (*manner, method, and system*) terhadap rakyatnya.

Bintoro Tjokroaminoto dalam bukunya pengantar ilmu Administrasi Pembangunan (1985: 17), dalam Syafi'ie (2004: 6-7) menyebutkan pula peranan dan fungsi pemerintah sebagai berikut: Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal : "Yang pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada Negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk menumbuhkembangkan masyarakat, sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan

Laissez Faire. Namun, ada pula Negara filsafat hidupnya menghendaki Negara dan pemerintah memimpin serta mengurus segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisional. Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang mandat untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah". Negara yang sedang berkembang, peran pemerintah sangat penting dan menonjol. Karena pemerintah berperan menggali, menggerakkan, dan mengkombinasikan berbagai faktor, seperti tenaga terlatih, biaya, peralatan, partisipasi dan kewenangan yang sah. Pemerintah memegang peranan sentral dalam pembangunan nasional. Hal ini terlihat dalam pengaturan administrasi Negara, pemerintah mengurus masyarakat yang belum lahir (dengan keluarga berencana) sampai kepada masyarakat yang sudah meninggal dunia (dengan dinas pemakaman).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalisasi, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dari segala aspek. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas dan

telah menjadi salah satu fungsi pemerintah daerah meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD. menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "*Pelaksanaan pemerintahan daerah terdapat asas yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan*", salah satunya yakni Penerapan Asas Desentralisasi.

Makna dari itu, asas desentralisasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut (UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, Pasal 1 ayat 8) :

- a. Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan;
- b. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan;
- c. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberrian kekuasaan dan kewenangan;

- d. Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

Selain itu, beberapa ahli mencoba memberikan pandangan mengenai makna dari asas desentralisasi.

Pertama, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan dan kewenangan. Pandangan ini sesuai dengan Hazairin (1906-1975) yang menganggap bahwa desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan dan kewenangan (urusan) pemerintah pusat kepada daerah. Sementara (*DeRuiter*) berpandangan bahwa penyerahan kekuasaan atau wewenang ini terjadi bukan pada pemerintah pusat, tetapi dari badan yang lebih tinggi kepada badan yang lebih rendah. Dalam arti ketatanegaraan, yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atas kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Pemaknaan desentralisasi dibedakan dalam empat hal yakni:

- a. Kewenangan untuk mengambil keputusan diserahkan dari seorang pejabat administrasi/pemerintah kepada yang lain;
- b. Pejabat yang menyerahkan itu mempunyai lingkungan pekerjaan yang lebih luas daripada pejabat yang disertai kewenangan tersebut;

- c. Pejabat yang menyerahkan kewenangan tidak dapat member perintah kepada pejabat yang telah diserahi kewenangan itu, mengenai pengambilan keputusan atau isi keputusan itu, serta;
- d. Pejabat yang menyerahkan kewenangan itu tidak dapat menjadikan keputusannya sendiri sebagai pengganti keputusan yang telah diambil, tidak dapat secara bebas menurut pilihan sendiri sebagai pengganti keputusan yang telah diserahi kewenangan itu dengan orang lain, tidak dapat menyingkirkan pejabat yang telah diserahi kewenangan itu dari tempatnya.

Kedua, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dapat dilihat dari pandangan *Logemann (1954)* bahwa desentralisasi adalah sebagai pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah. Sementara Ateng menjadikan saran dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan dalam rangka desentralisasi. Berbeda dengan *G. Shabbir Cheema* memandang bahwa pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah itu berkisar pada perencanaan dan pengambilan keputusan. Menurut *Gie* bahwa desentralisasi dibidang pemerintahan diartikan sebagai pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok yang mendiami suatu wilayah.

Ketiga, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi dalam system pemerintahan merupakan pembagian, penyebaran, pemencaran, pemberian kekuasaan, dan kewenangan dapat dilihat dari pandangan yang dikemukakan oleh *Duchacek, Widodo, (2001:45)* bahwa masalah desentralisasi berujung pada pembagian kekuasaan atau kewenangan dalam suatu pemerintahan. Di sisi lain, *Tresna* berpandangan bahwa desentralisasi diartikan sebagai pemberian kekuasaan mengatur diri kepada daerah-daerah dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi di dalam pemerintahan Negara.

Keempat, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi merupakan sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah dapat dilihat dari pandangan Smith dalam *Aldefer (1964:178)* yaitu desentralisasi adalah pembentukan daerah otonomi dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, insiatif, dan administrasi sendiri. Jadi, desentralisasi menyangkut pembentukan daerah otonom dengan dilengkapi kewenangan-kewenangan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu.

Dari beberapa pandangan pakar di atas dengan jelas menafsirkan bahwa makna desentralisasi melahirkan sisi

penyerahan kewenangan, pembagian kekuasaan, pendelegasian kekuasaan, pendelegasian kewenangan, dan pembagian daerah dalam struktur pemerintahan di Negara kesatuan. Penyerahan, pendelegasian, dan pembagian kewenangan dengan sendirinya menciptakan kewenangan pada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, yang didahului pembagian daerah pemerintahan dalam bingkai daerah otonom.

Peranan pemerintah daerah berarti kedudukan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* (UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 2). Selanjutnya peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan semua hak, wewenang dan kewajibannya tentunya harus sesuai dengan peranannya yakni berdasarkan kedudukannya sehingga tidak terjadi tumpang tidak di dalam ranah pemerintahan. Sebagai daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Tinjauan tentang Pendidikan

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 butir 1 disebutkan: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Menurut Hasan dalam Ahmadi (1990:8) menyatakan pendidikan adalah usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan atau potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Pengertian sederhana dan umum, makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan baik kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak, yang harus dipenuhi sepanjang hayat, tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok

manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. Secara khusus pendidikan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pengabdian mutu, keahlian dan keterampilan;
- b. Menciptakan pola daya pikir yang sama;
- c. Menciptakan dan mengembangkan metode *specification* yang lebih baik; dan
- d. Membina masyarakat daerah setempat.

Ki Hadjar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa yang pertama pada tahun 1930 menyebutkan pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intelekt*) dan tubuh anak dalam taman siswa tidak boleh dipisahkan, bagianbagian itu agar kita dapat memajukan kesempatan hidup. Kehidupan dan penghidupan anak didik selaras dengan dunianya.

Pendidikan yang kita inginkan saat ini ialah pendidikan pemberdayaan yang bertujuan memberdayakan setiap anggota masyarakat untuk dapat berprestasi setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan yang telah dikembangkan di dalam dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan ini maka diperlukan peran aktif pemerintah daerah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota

merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi: Penyelenggaraan pendidikan; Penanggulangan masalah sosial. Hal ini tentunya memberikan kewenangan pemerintah daerah setempat dalam membangun daerahnya sendiri termasuk masyarakat di dalamnya untuk diberdayakan. Pendidikan berfungsi menunjang pembangunan bangsa dalam arti yang luas yaitu menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Proses pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses pemberdayaan, yaitu suatu proses untuk mengungkapkan potensi yang ada pada manusia sebagai individu yang selanjutnya dapat memberikan sumbangan kepada pemberdayaan masyarakat dan bangsanya.

Menurut Amin Duien Indra Kusuma (1973:218), pengertian pendidikan itu harus terkandung hal-hal yang pokok sebagai berikut:

- a. Bahwa pendidikan itu tidak lain adalah merupakan suatu usaha dari manusia;
- b. Bahwa itu dilakukan dengan sengaja atau sadar;
- c. Bahwa usahanya itu dilakukan oleh orang-orang yang merasa bertanggung jawab kepada hari depan anak didiknya;
- d. Bahwa usahanya berupa bantuan untuk bimbingan rohani dan dilakukan secara teratur dan sistematis;

- e. Bahwa yang menjadi objek pendidikan itu adalah anak/ peserta didik yang masih dalam pertumbuhan/perkembangan atau memerlukan pendidikan;
- f. Bahwa batas/sasaran akhir pendidikan adalah tingkat dewasa atau kedewasaan.

H.G Wells (2005) menyatakan bahwa pendidikan itu penting, tanpa pendidikan, bangsa yang bersangkutan akan hancur sedangkan dengan mengutamakan pendidikan bangsa yang bersangkutan akan jaya. Maka isi dan esensi dari pernyataan tersebut adalah betapa pentingnya masalah pendidikan itu, sering dikatakan pendidikan bersifat strategis, artinya dalam posisi suatu Negara dan bangsa, masalah pendidikan adalah masalah yang menentukan berhasil tidaknya bangsa tersebut dalam perjuangan.

Menurut S. P Siagian (1986) bahwa pendidikan adalah keseluruhan proses, teknik dan metode belajar mengajar dalam rangka menggalakkan sesuatu ilmu yang telah ditetapkan selamanya.

N. Drijakarya. Sj, tentang pendidikan (Djakarta: Kanisius, 1980:7), pendidikan adalah memanusiakan manusia muda. Jadi pendidikan tersebut dilakukan oleh manusia (dewasa) dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh serta strategis dan siasat yang tepat demi keberhasilan pendidikan tersebut.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional, semakin jelas bahwa pengertian pendidikan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Bab I, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun fungsi dari pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional yaitu “Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun prinsip penyelenggaraan pendidikan yang terdapat dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminasi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya, membaca, menulis dan menghitung bagi segenap warga masyarakat;
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

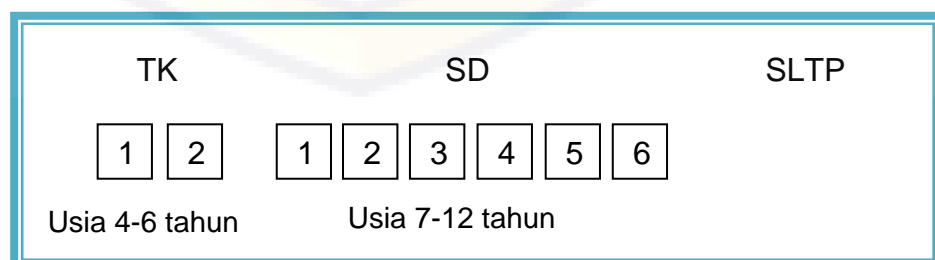
Selain itu pendidikan nasional mempunyai visi yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- c. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
- d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
- e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan terdapat jenjang pendidikan yang dilalui oleh peserta didik. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Di samping jenjang pendidikan itu dapat didalam pendidikan prasekolah yang tidak merupakan prasyarat untuk memasuki pendidikan dasar.

a. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menambahkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta dipersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar pada prinsipnya merupakan pendidikan memberikan bekal dasar bagi perkembangan kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk ,masyarakat. Karena itu, bagi setiap warga Negara harus disediakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar.



Gambar 2.1 Umur dan Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar

b. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik, dengan lingkungan sosial budaya dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau dunia pendidikan tinggi. Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

c. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan tinggi yang bersifat akademik dan professional sehingga dapat menciptakan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan manusia.

6. Tinjauan tentang Anak Putus Sekolah

Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Undang-undang nomor 4 tahun 1979, anak terlantar diartikan sebagai anak yang orang tuanya karena suatu sebab, tidak mampu memenuhi kebutuhan anak sehingga anak menjadi terlantar. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa anak terlantar yakni anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara wajar, baik kebutuhan fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Menurut Departemen Pendidikan di Amerika Serikat *MC Millen Kaufman, dan Whitener*, (1996) mendefinisikan bahwa anak putus sekolah adalah murid yang tidak dapat menyelesaikan program belajarnya sebelum waktunya selesai atau murid yang tidak tamat menyelesaikan program belajarnya. Ary H. Gunawan (2010: 71) menyatakan bahwa “putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya”. Hal ini berarti, putus sekolah ditujukan kepada seseorang yang pernah bersekolah namun berhenti untuk bersekolah. Hal senada diungkapkan oleh Nazili Shaleh Ahmad (2011: 134) bahwa yang dimaksud dengan putus sekolah yaitu “berhentinya belajar seorang murid baik ditengah-tengah tahun ajaran atau pada akhir tahun ajaran karena berbagai alasan tertentu yang mengharuskan atau memaksanya untuk berhenti sekolah”. Hal ini berarti putus sekolah

dimaksudkan untuk semua anak yang tidak menyelesaikan pendidikan mereka.

Anak putus sekolah terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai fungsi sekolah. Adapun fungsi dari sekolah menurut S. Nasution (1990) antara lain:

a. Sekolah Mempersiapkan Anak Untuk Suatu Pekerjaan

Anak yang telah menamatkan sekolah diharapkan sanggup melakukan pekerjaan sebagai mata pencaharian atau setidaknya mempunyai dasar untuk mencari nafkahnya. Makin tinggi pendidikan, makin besar harapannya memperoleh pekerjaan yang baik. Ijazah masih tetap dijadikan syarat penting untuk suatu jabatan, walaupun ijazah itu sendiri belum menjamin kesiapan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Akan tetapi dengan ijazah yang tinggi seorang dapat memahami dan menguasai pekerjaan kepemimpinan atau tugas lain yang dipercayakan kepadanya. Memiliki ijazah perguruan tinggi merupakan bukti akan kesanggupan intelektualnya untuk menyelesaikan studinya yang tidak mungkin dicapai oleh orang yang rendah kemampuannya.

b. Sekolah Memberikan Keterampilan Dasar

Orang yang telah bersekolah setidaknya pandai membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam tiap masyarakat modern seperti saat ini. Selain itu diperoleh

sejumlah pengetahuan lain seperti sejarah, geografi, kesehatan, kewarganegaraan, fisika, biologi, bahasa, dan lain-lain yang membekali anak untuk melanjutkan pelajarannya, atau memperluas pandangan dan pemahamannya tentang masalah-masalah dunia dan perkembangan zaman.

c. Sekolah Membuka Kesempatan Memperbaiki Nasib

Sekolah sering dipandang sebagai jalan bagi mobilitas sosial. Melalui pendidikan orang dari golongan rendah dapat meningkat ke golongan yang lebih tinggi. Orang tua mengharapkan agar anak-anak mereka mempunyai nasib yang lebih baik dari mereka. Sehingga orang tua yang mempunyai kesadaran tentang pentingnya sekolah akan menyekolahkan anak mereka hingga perguruan tinggi dan mencapai cita-cita anak mereka. Karena gelar akademis sangat membantu untuk menduduki tempat terhormat dalam dunia pekerjaan.

d. Sekolah Menyediakan Tenaga Pembangunan

Bagi daerah yang mempunyai kekayaan alam yang sangat mendukung tentunya membutuhkan tenaga ahli dalam mengelolah kekayaan alam tersebut. Maka dari itu pendidikan dipandang sebagai alat yang paling ampuh untuk menyiapkan tenaga yang terampil dan ahli dalam sektor pembangunan. Jadi, wajar saja apabila manusia dianggap sumber utama bagi setiap pembangunan.

e. Sekolah Membantu Memecahkan Masalah-Masalah Sosial

Masalah-masalah sosial diharapkan dapat diatasi dengan mendidik generasi muda untuk mengelakkan atau mencegah penyakitpenyakit sosial seperti kejahatan, pertumbuhan penduduk yang melewati batas, perusakan lingkungan, kecelakaan lalu lintas, narkoba dan sebagainya.

f. Sekolah Membentuk Manusia yang Sosial

Pendidikan diharapkan membentuk manusia sosial, yang dapat bergaul dengan sesama manusia sekalipun berbeda agama, sukubangsa, pendirian, dan sebagainya. ia juga harus dapat menyesuaikan diri dalam situasi sosial yang berbeda-beda. Kalau diselidiki tentu akan ditemukan bermacam-macam alasan lain mengapa orang tua menyekolahkan anaknya, misalnya menyekolahkan anak gadisnya sampai ada yang meminangnya, atau menyerahkan anaknya kedalam pengawasan guru karena lebih sulit mengurusnya sendiri di rumah, dan sebagainya.

g. Sekolah Merupakan Alat Mentransformasi Kebudayaan

Sekolah, terutama perguruan tinggi diharapkan menambah wawasan dengan mengadakan penemuan-penemuan baru yang dapat membawa perubahan dalam masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang besar di dunia ini.

h. Fungsi-fungsi Sekolah Lainnya

Sekolah dapat pula dipandang sebagai tempat menitipkan anak, khususnya anak-anak pra-sekolah. Juga perguruan tinggi dapat dipandang sebagai tempat penitipan pemuda di mana mereka lebih baik diawasi dari pada di luar sekolah, sambil menunggu waktunya mereka mendapat pekerjaan. Bagi mahasiswa sekolah juga merupakan kesempatan untuk mendapatkan jodoh

B. Kerangka Pikir

Secara jelasnya untuk melihat bagaimana alur penelitian dan penulisan dapat tergambarkan dalam bagan di bawah ini:



Gambar 2.2 Skema Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan dari masyarakat, dengan pertimbangan bahwa komponen-komponen tersebut berperan penting dalam permasalahan yang diteliti

B. Jenis dan Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai objek yang diteliti dan berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun di dalam melihat kebenaran tersebut, tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadang kala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus melacaknya lebih jauh ke balik sesuatu yang nyata tersebut.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, artinya penulis akan meneliti satu unit sosial yang berkaitan dengan fokus permasalahan secara lebih mendalam. Penulis

menggunakan metode kualitatif karena permasalahan yang ada dinamis dan kompleks.

C. Variabel dan Defenisi Operasional Variabel

1. Variable Penelitian

Adapun variable dalam penelitian yakni:

a. variabel bebas

- 1) Peran pemerintah daerah
- 2) Kebijakan pemerintah daerah
- 3) Bantuan-bantuan pemerintah

b. Variable terikat

Anak putus sekolah

2. Defenisi Operasional Variabel

Dalam rangka memudahkan proses analisa data yang diperoleh, maka definisi konsep yang ada dioperasionalisasikan ke dalam indikator-indikator agar mampu menggambarkan dan menjelaskan gejala-gejala yang dapat diuji kebenarannya. Adapun operasionalisasi konsep dalam penulisan ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Peranan pemerintah

Peranan pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Dinas Pendidikan) sehubungan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan di

tingkat daerah dan pengambil kebijakan yang ada di daerah Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan anak putus sekolah.

b. Kebijakan pemerintah daerah

Kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan menekan angka anak putus sekolah, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun Keputusan Bupati Kabupaten Pangkep.

c. Bantuan-bantuan Pemerintah

Bantuan-bantuan pemerintah yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan lembaga pendidikan disetiap jenjangnya. Baik berupa bantuan finansial dan motivasi-motivasi dalam menekankan pada pentingnya proses pendidikan.

D. Populasi dan Sampel

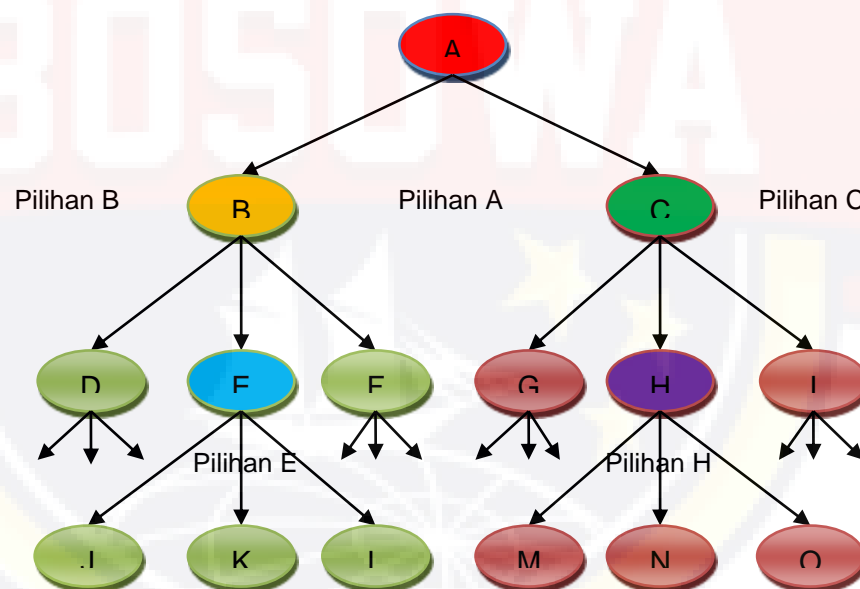
1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 80:2013) .

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah (Bupati atau Sekda), Dinas Pendidikan, UPTD Kecamatan Liukang Tangaya, Pihak Sekolah dan Orang tua siswa.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut yang diperoleh dengan teknik *non-probabiliti sampling* (*snowball sampling*) adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Adapun sampel yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah , Pemerintah Daerah (Bupati atau Sekda), Dinas Pendidikan, UPTD Kecamatan liukang Tangaya, Pihak Sekolah dan Orang tua siswa. Teknik pengambilan sampel ditunjukkan pada gambar sebai berikut (Sugiyono, 85:2013).



Gambar 3.1 Snowball Sampling (Sugiyono, 85:2013).

E. Instrumen Penelitian

1. Observasi

Kegiatan Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi lapangan penelitian, pengamatan langsung maupun tidak langsung yang ditemui di daerah penelitian.

2. Wawancara

Yaitu untuk cara yang ditempuh untuk mewawancarai para informan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan secara terstruktur yang ditunjukkan dengan jalan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yaitu Sekretaris daerah kabupaten pangkep, kepala dinas pendidikan pangkep, Kepala sekolah SDN di Kec. Liukang Tangaya, Kepala Kelurahan Liukang Tangaya, dan orang tua dengan pertanyaan yang disiapkan

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya, data primer diperoleh melalui :

a. Observasi

Yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.

b. Interview

Yaitu wawancara mendalam (*in dept interview*) yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

2. Data Sekunder

Adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari dokumentasi maupun studi pustaka. Adapun data sekunder diperoleh melalui :

a. Dokumentasi

Yang dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa hasil rapat, laporan pertanggung jawaban, surat, dan catatan harian

b. Studi pustaka

Merupakan langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah untuk mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian dan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang,

sampai ke mana terdapat kesimpulan dan degeneralisasi yang pernah dibuat. Cara yang dilakukan dengan mencari data-data pendukung (data sekunder) pada berbagai literatur baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen, makalah-makalah hasil penelitian serta bahan-bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tersebut pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini diuraikan hasil penelitian yang didapatkan penulis selama melakukan penelitian di Kabupaten Pangkep serta Dinas/Instansi yang terkait beserta pembahasannya. Bab ini menguraikan tentang Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kecamatan Liukang Tangaya. Berdasarkan kasus anak putus sekolah yang ditemukan penulis di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan mengambil example dari Satu kecamatan. yakni Kecamatan Liukang Tangaya

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Penelitian

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Jumlah Penduduk Kecamatan Liukang Tangaya pada tahun 2015 sebanyak 20.524 Jiwa yang terdiri dari 10.015 Jiwa laki-laki dan 10.509 Jiwa perempuan dengan kepadatan penduduk 171 Jiwa/Km². Sebagai Ibukota kecamatan, Kelurahan Sapuka merupakan kelurahan dengan penduduk terbanyak yaitu 4.570 orang. Sedangkan Desa Kapoposang Bali adalah desa dengan penduduk terkecil yaitu 844 orang. Liukang Tangaya sendiri meningkat dari tahun 2014 dari 20.001 menjadi 20.524 orang. Kelurahan Sapuka juga Kelurahan dengan jumlah rumah tangga terbanyak yaitu 1.136 rumah tangga. Kepadatan penduduk Liukang Tangaya pada tahun 2015 sebesar 171 jiwa/km² artinya setiap 1 km² terdapat 171 jiwa. Kelurahan Sapuka merupakan desa terpadat dengan kepadatan penduduk 322 jiwa/km² dan Desa Satanger adalah desa dengan kepadatan penduduk terkecil 72 jiwa/km². berdasarkan agama, semua penduduk Kecamatan Liukang Tangaya beragama Islam tanpa ada agama lain yang

dianut masyarakat. Liukang Tangaya merupakan salah satu kecamatan yang tersulit dijangkau di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Jaraknya yang jauh serta susahnyanya transportasi menyebabkan Liukang Tangaya tertinggal dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di daratan. Kurangnya sarana pendidikan menjadikan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Liukang Tangaya serta masih minimnya fasilitas kesehatan menyebabkan masyarakat Liukang Tangaya sangat kesulitan jika akan berobat ketika sakit.

Kecamatan Liukang Tangaya memiliki sarana pendidikan formal pada tahun ajaran 2016/2017 berupa :

27 SD dengan jumlah murid sebanyak 3.154 orang

13 SMP dengan jumlah murid sebanyak orang 759 orang

3 SMA dengan jumlah murid sebanyak orang 382 orang

terdiri dari : 2 buah Puskesmas, 5 buah Pustu, 21 buah Posyandu, dan 13 Poskesdes. Tenaga kesehatan terdiri dari 6 orang dokter, 11 bidan dan 52 orang dukun bayi.

1) Letak dan Kondisi Geografis

Kecamatan Liukang Tangaya merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terletak di wilayah laut dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Luas wilayah kecamatan Liukang Tangaya sekitar 12.000 Ha dengan batas - batas adminisrasi sebagai berikut

Sebelah Utara : Kecamatan Liukang Kalmas

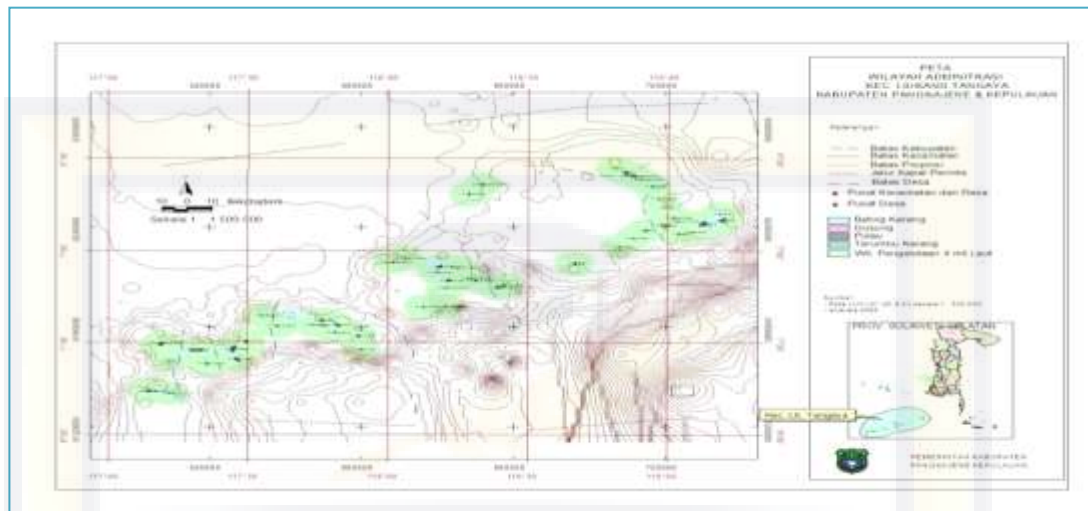
Sebelah Timur : Kabupaten Selayar

Sebelah Selatan : Provinsi NTB

Sebelah Barat : Provinsi Jawa Timur

Wilayah Kecamatan Liukang Tangaya merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 53 pulau-pulau kecil dengan 27 pulau yang dihuni masyarakat kecamatan Liukang Tangaya. Desa dengan jarak tempuh terjauh dari ibukota kabupaten adalah Desa Kapoposan Bali dengan jarak 594 km sedangkan yang terdekat adalah Desa Sabaru yang berjarak 243 km dari ibukota Kabupaten.

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Liukang Tangaya



Sumber : BAPEDA Pangkep

Tabel 4.1 Jarak Pulau-Pulau Di Kecamatan Liukang Tangaya

| N O | KODE | JARAK (KM) | MILL | NAMA PULAU | DESA/ KELURAHAN |
|-----|----------|------------|----------|-------------------|-----------------|
| 1. | LKTG8KG | 345.9900 | 216.2438 | P. Kawasang | Tampaang |
| 2. | LKTG8SL | 349.2100 | 218.2563 | P. Satunggul | Tampaang |
| 3. | | 344.4100 | 215.2563 | Karang Satunggul | |
| 4. | LKTG6KK | 296.2500 | 185.1563 | P. Karang Koko | Sapuka |
| 5. | LKTG6KN | 298.1700 | 186.3563 | P. Kambanglamari | Sapuka |
| 6. | LKTG6TG | 293.3100 | 183.3188 | P. Tinggalunggang | Sapuka |
| 7. | LKTG6SPB | 290.3200 | 181.4500 | P. Sapuka Bsr. | Sapuka |
| 8. | LKTG6SPK | 293.3200 | 183.3250 | P. Sapuka Kcl. | Sapuka |
| 9. | | 311.8500 | 194.9063 | P. Tokohbatu | |
| 10. | LKTG6LG | 314.9900 | 196.8688 | P. Lamuruang | Sapuka |
| 11. | LKTG6SG | 300.5100 | 187.8188 | P. Sarasang | Sapuka |
| 12. | LKTG6SGK | 300.5100 | 187.8188 | P. Sarasang Kecil | Sapuka |
| 13. | LKTG6SJ | 287.3300 | 179.5813 | P. Sambar Jaga | Sapuka |
| 14. | LKTG1PNK | 289.1300 | 180.7063 | P. Pelokan Kecil | Balo-Baloang |
| 15. | LKTG1PN | 290.9800 | 181.8625 | P. Pelokan | Balo-Baloang |
| 16. | LKTG6SGL | 291.0800 | 181.9250 | P.Sambar Galang | Sapuka |
| 17. | LKTG6SGT | 290.4200 | 181.5125 | P.Sambar Gitang | Sapuka |
| 18. | LKTG1LG | 247.1400 | 154.4625 | P. Longkoitang | Balo-Baloang |
| 19. | LKTG1BG | 183.7000 | 114.8125 | P.Bangkobangkoang | Balo-Baloang |
| 20. | LKTG1SE | 265.9000 | 166.1875 | P. Sarage | Balo-Baloang |
| 21. | LKTG1SG | 250.8600 | 156.7875 | P. Sadulangang | Balo-Baloang |

| | | | | | |
|----|----------|----------|----------|----------------------|-----------------|
| 22 | LKTG1MG | 244.2500 | 152.6563 | P. Manukang | Balo-Baloang |
| 23 | LKTG1BO | 238.3900 | 148.9938 | P. Balaloho | Balo-Baloang |
| 24 | LKTG3MAG | 233.5900 | 145.9938 | P. Matalaang | Sabalana |
| 25 | LKTG3SA | 229.1000 | 143.1875 | P. Sabalana | Sabalana |
| 26 | LKTG3PG | 230.2200 | 143.8875 | P. Pamolikang | Sabalana |
| 27 | LKTG3LG | 222.5100 | 139.0688 | P. Lilikang | Sabalana |
| 28 | LKTG3BA | 226.1000 | 141.3125 | P. Banawaya | Sabalana |
| 29 | LKTG3SG | 235.2100 | 147.0063 | P. Santigiang | Sabalana |
| 30 | LKTG3SB | 229.9800 | 143.7375 | P. Sanana Besar | Sabalana |
| 31 | LKTG3SK | 228.0600 | 142.5375 | P. Sanana Kecil | Sabalana |
| 32 | LKTG3LA | 222.9500 | 139.3438 | P. Laiya | Sabalana |
| 33 | LKTG3MG | 232.6500 | 145.4063 | P. Meong | Sabalana |
| 34 | LKTG3MKN | 218.8300 | 136.7688 | P. Makaranangan | Sabalana |
| 35 | LKTG1SA | 212.5000 | 132.8125 | P. Sumanga | Balo-Baloang |
| 36 | LKTG1BBK | 209.5700 | 130.9813 | P. Balobaloang Kecil | Balo-Baloang |
| 37 | LKTG1BBB | 208.6800 | 130.4250 | P. Balobaloang Br. | Balo-Baloang |
| 38 | LKTG4JU | 207.2500 | 129.5313 | P. Jailamu | Sabaru |
| 39 | LKTG4SU | 207.7700 | 129.8563 | P. Sabaru | Sabaru |
| 40 | LKTG5SB | 377.1200 | 235.7000 | P. Sailus Besar | Sailus |
| 41 | LKTG7SR | 386.3100 | 241.4438 | P. Satanger | Satanger |
| 42 | LKTG5MG | 370.6900 | 231.6813 | P. Marabatuang | Sailus |
| 43 | LKTG2SR | 413.5000 | 258.4375 | P. Sadapur | Kapoposang Bali |
| 44 | LKTG2KB | 392.3000 | 245.1875 | P. Kapoposang Bali | Kapoposang Bali |
| 45 | LKTG5SK | 381.0300 | 238.1438 | P. Sailus Kecil | Sailus |
| 46 | LKTG8TG | 343.0100 | 214.3813 | P. Tampaang | Tampaang |
| 47 | LKTG8AG | 341.6200 | 213.5125 | P. Aloang | Tampaang |
| 48 | LKTG8SG | 342.6700 | 214.1688 | P. Sapinggang | Tampaang |
| 49 | LKTG3SU | 237.0100 | 148.1313 | P. Sarabu | Sabalana |
| 50 | LKTG8PN | 346.7000 | 216.6875 | P. Pandangan | Tampaang |
| 51 | LKTG8BO | 345.1100 | 215.6938 | P. Boko | Tampaang |
| 52 | LKTG5MKN | 218.7400 | 136.7125 | P. Makaranganan | Sailus |
| 53 | LKTG5SG | 354.4100 | 221.5063 | P. Saujung | Sailus |

Sumber : BPS Pangkajene dan Kepulauan.

2) Kependudukan

Jumlah Penduduk Kecamatan Liukang Tangaya pada tahun 2015 sebanyak 20.524 Jiwa yang terdiri dari 10.015 Jiwa laki-laki dan 10.509 Jiwa perempuan dengan kepadatan penduduk 171 Jiwa/Km². Sebagai Ibukota Kecamatan, Kelurahan Sapuka merupakan kelurahan dengan penduduk terbanyak yaitu 4.570 orang. Sedangkan Desa Kapoposang Bali adalah desa dengan penduduk terkecil yaitu 844 orang.

Liukang Tangaya sendiri meningkat dari tahun 2014 dari 20.001 menjadi 20.524 orang. Kelurahan Sapuka juga Kelurahan dengan jumlah rumah tangga terbanyak yaitu 1.136 rumah tangga. Kepadatan penduduk Liukang Tangaya pada tahun 2015 sebesar 171 jiwa/km² artinya setiap 1 km² terdapat 171 jiwa. Kelurahan Sapuka merupakan desa terpadat dengan kepadatan penduduk 322 jiwa/km² dan Desa Satanger adalah desa dengan kepadatan penduduk terkecil 72 jiwa/km². berdasarkan agama, semua penduduk Kecamatan Liukang Tangaya beragama Islam tanpa ada agama lain yang dianut masyarakat.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Liukang Tangaya Menurut Jenis Kelamin Tiap Desa/Kelurahan

| No | Desa/Kelurahan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | SABALANA | 2.130 | 2.314 | 4.444 |
| 02 | BALO-BALOANG | 1.670 | 1.703 | 3.373 |
| 03 | SABARU | 467 | 467 | 934 |
| 04 | SAPUKA | 2.331 | 2.404 | 4.739 |
| 05 | TAMPAANG | 637 | 696 | 1.333 |
| 06 | SAILUS | 1.563 | 1.618 | 3.181 |
| 07 | SATANGGER | 615 | 669 | 1.284 |
| 08 | KAPOPOSANG BALI | 434 | 423 | 857 |
| 09 | POLEONRO | 447 | 489 | 936 |
| JUMLAH/TOTAL | | 10.294 | 10.787 | 21.081 |

Sumber : Proyeksi Kependudukan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2016

Sumber : BPS Pangkajene dan Kepulauan

3) Kondisi Sosial Budaya

a) Kondisi Politik dan Keamanan

Kondisi politik dan keamanan di daerah Kabupaten Pangkep sifatnya dinamis dan terbuka. Hal ini sinergis dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem demokratis yang memberikan kebebasan rakyatnya dalam artian kedaulatan berada ditangan rakyat. Sistem pemerintahan yang demokratis tersebut diperkuat dengan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan politik seperti pemilihan kepala desa, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan Bupati.

Pada kondisi perpolitikan Kabupaten Pangkep termasuk suatu daerah yang tidak memiliki potensi konflik yang besar. Hal ini disebabkan karakter masyarakat yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi pada setiap kontes pemilihan pimpinan.

Kondisi perpolitikan Kabupaten Pangkep tersebut dapat dilihat pada partisipasi penduduk di PEMILUKADA (Pemilihan Bupati Pangkep) yang dimana menjalankan proses dengan sangat demokratis tanpa adanya kerusuhan atau konflik pada masyarakat.

b) Nilai

Nilai-nilai yang dianut dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Pangkep diangkat dari

nilai/budaya tradisional yang dikombinasikan dengan cara pandang yang dianut secara global dan diterima secara luas oleh masyarakat. Nilai yang dituangkan disini bertolak pada dua bentuk yaitu:

(1) Nilai sosial kemasyarakatan, yang bertolak pada kearifan budaya Pangkep *Taro Ada Taro Gau* “konsisten perbuatan dengan apa yang telah dikatakan”

(2) Nilai Religius /Ketuhanan yaitu : eksistensi mappere, adat perkawinan

4) Visi dan Misi Kabupaten Pangkep

Visi: “Kabupaten pangkajene dan kepulauan mewujudkan desa modern yang produktif dan berkarakter menuju daerah yang lebih maju dan mandiri”.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pangkep, ditetapkan misi sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan dan memanfaatkan keunikan sebagai kepulauan kesejahteraan masyarakat.
- b) Meningkatkan kecerdasan, profesionalisme dan karakter SDM.
- c) Mengembangkan interkoneksi dan jejaring antar wilayah di tingkat nasional, regional, dan internasional.

- d) Menciptakan lingkungan yang kondusif
- e) Menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- f) Program unggulan Membangun Desa/Kelurahan.
- g) Bantuan Irigasi, kolam iar, bibit, Alsintam, alat tangkap untuk petani dan nelayan.
- h) Ketersediaan air bersih bagi masyarakat desa dan kelurahan.
- i) Bantuan penerangan umum di desa/kelurahan.
- j) Bantuan sepra kesehatan.
- k) Bantuan SPP mahasiswa perguruan tinggi.
- l) Bantuan Bedah rumah di desa/kelurahan.
- m) Bantuan sepra Olahraga.
- n) Bantuan keterampilan dan pelatihan kerja.
- o) Bantuan pasar desa, bundes, dan permodalan.
- p) Bantuan sarana ibadah dan keagamaan.
- q) Tambahan penghasilan PNS/Insentif desa.
- r) Percepatan sapra : Penerangan, Telekomunikasi, Transportasi, Air bersih, Kelutan dan perikanan di pulau.

5) Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkep

Adapun susunan struktur pemerintah daerah Kabupaten Pangkep terdiri atas:

- a) Bupati Pangkep

b) Wakil Bupati Pangkep

c) Sekretaris Daerah Kab. Pangkep

(1) Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkep

(2) Sekretariat DPRD

d) Dinas

(1) DISDIK

(2) DISPORA

(3) DINKES

(4) DISOSNAKER

(5) DISHUB KOMINFO

(6) DINAS DUKCAPIL

(7) DISBUDPAR

(8) DINAS PU

(9) DISTARKIMSIH

(10) DINAS KOPERINDANG

(11) DISPERTANAK

(12) DISKP

(13) DISPENDA

e) Badan atau Kantor

(1) INSPEKTORAT

(2) BAPPEDA

(3) BKDD

(4) BPMPD

- (5) BKPP3
- (6) BLH
- (7) BPPKB
- (8) BPMPTSP
- (9) BPKD
- (10) BPBD
- (11) KPAD
- (12) KESBANG POL
- (13) SATPOL PP
- (14) RSUD

f) Kecamatan

- (1) Kec. Pangkajene
- (2) Kec. Balocci
- (3) Kec. Tondong Tallasa
- (4) Kec. Minasatene
- (5) Kec. Bungoro
- (6) Kec. Labakkang
- (7) Kec. Marang
- (8) Kec. Segeri
- (9) Kec. Mandalle
- (10) Kec. LK. Tangaya
- (11) Kec. LK. Kalmas
- (12) Kec. LK. Tupabiring

(13)Kec. LK. Tupabiring Utara

6) Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkep pada Bab III (tiga) Bagian Pertama Pasal 3 menyatakan bahwa: Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pada Pasal 4 dijelaskan bahwa: Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan;

- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e) Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkep pada Bab III (tiga) Bagian Kedua Pasal 5 menjelaskan tentang Susunan dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep, sebagai berikut:

- a) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
 - (1) Kepala Dinas;
 - (2) Sekretariat;
 - (a) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - (b) Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - (c) Sub. Bagian Keuangan
 - (3) Bidang Pendidikan Dasar :
 - (a) Seksi Manajemen Pendidikan Dasar

(b) Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dasar

(c) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

(4) Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan:

(a) Seksi Manajemen Pendidikan Menengah dan Kejuruan

(b) Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Menengah dan Kejuruan

(c) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dan Kejuruan

(5) Bidang Pendidikan Pra Sekolah :

(a) Seksi Manajemen Pra Sekolah

(b) Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pra Sekolah

(c) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Pra Sekolah

(6) Bidang Pendidikan Luar Sekolah :

(a) Seksi Manajemen Pendidikan Luar Sekolah

(b) Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah

(c) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah.

8) Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Pangkep Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

a) Urusan Rutin SKPD;

- (1) Program pelayanan administrasi perkantoran;
- (2) Program peningkatan sarana prasarana aparatur;
- (3) Program peningkatan disiplin aparatur;
- (4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- (5) Program perencanaan dan pelaporan, kinerja dan keuangan.

b) Urusan Wajib Pendidikan:

- (1) Program pendidikan anak usia dini;
- (2) Program pendidikan non formal dan informal;
- (3) Program wajib belajar 12 tahun;
- (4) Program pendidikan menengah dan kejuruan;
- (5) Program pengkajian perencanaan pendidikan;
- (6) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan;
- (7) Program manajemen pelayanan pendidikan

2. Penyajian Data Hasil Penelitian

- a. Peranan Pemerintah Daerah dalam menekan Angka Anak Putus Sekolah di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting bagi pembangunan bangsa. Hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional mereka. Pada masa seperti sekarang ini pendidikan merupakan suatu kebutuhan primer, dimana dalam memasuki era globalisasi seperti sekarang ini pendidikan sangatlah penting peranannya. Orang-orang berlomba untuk dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin untuk mengejar teknologi yang semakin canggih. Tetapi disisi lain ada sebagian masyarakat tidak dapat mengenyam pendidikan secara layak, baik dari strata tingkat dasar sampai jenjang yang lebih tinggi. Selain itu juga ada sebagian masyarakat yang sudah dapat mengenyam pendidikan dasar namun pada akhirnya putus sekolah juga.

Ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak dapat mengenyam pendidikan atau putus sekolah, hal tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Pangkep, khususnya pemerintah Kecamatan Liukang Tangaya dalam menekan angka anak putus sekolah yang merupakan salah satu faktor pendukung program prioritas pemerintah

Kabupaten Pangkep tahun 2014 dalam rangka menjamin hak setiap masyarakat untuk mengenyam pendidikan demi meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan, jumlah anak putus sekolah terkhususnya di kecamatan liukang tangaya tahun 2015 mencapai angka 145 anak.

“Hal tersebut menunjukkan penurunan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, inilah yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dari tahun ke tahun untuk terus meningkatkan kinerja kerja di bidang pendidikan”, jelas Kadis Pendidikan Kabupaten Pangkep Drs. H. Mohammad Ridwan, M.Pd. saat diwawancarai di ruangannya Selasa 18 Juli 2017, pukul 10:47.

Kondisi anak putus sekolah di Kabupaten Pangkep untuk tiga tahun terakhir yakni 2014 sampai dengan 2016, akan di gambarkan oleh table berikut:

Tabel 4.3 Kondisi Anak Putus Sekolah di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep tingkat SD tahun 2014-2016

| No | Tingkat Pendidikan | Kondisi anak putus sekolah Kecamatan liukang tangaya | | |
|----|--------------------|--|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Sekolah Dasar | 173 | 145 | 98 |

Sumber: UPTD Pendidikan Kec. Liukang Tangaya

Dari Tabel 4.3 menunjukkan kondisi anak putus sekolah setiap tahunnya mengalami penurunan, hal tersebut dapat dilihat dari

jumlah anak putus sekolah setiap tahunnya mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2014 jumlah anak putus sekolah mencapai angka 173 anak, pada tahun 2015 berada pada angka 145 anak, dan tahun 2016 kembali mengalami penurunan yang berada pada angka 98 anak. Hal ini dapat membuktikan adanya penurunan angka anak putus sekolah di Kabupaten Pangkep khususnya Kecamatan Liukang Tangaya. Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah terhadap hak setiap masyarakat, khususnya dalam menekan angka anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Pangkep tentunya membutuhkan peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep. Dimana, pemerintah daerah mengetahui apa yang menjadi hak dan kebutuhan masyarakatnya. Adapun peranan pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah antara lain: mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan, bantuan dana pendidikan, pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, dan program bantuan siswa miskin (BSM), serta sosialisasi kepada masyarakat.

1) Kebijakan di bidang pendidikan

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pangkep di bidang pendidikan tentunya sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Pangkep yakni Kabupaten pangkajene dan

kepulauan mewujudkan desa modern yang produktif dan berkarakter menuju daerah yang lebih maju dan mandiri.

Salah satu kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan anak putus sekolah yang terjadi adalah gerakan penuntasan wajib belajar 12 tahun dalam bentuk surat edaran Bupati Pangkep, yang telah diberikan kepada setiap perangkat pemerintahan yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa, untuk kemudian disosialisaikan dan memberikan pemahaman kepada setiap masyarakat sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak setiap masyarakat akan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap salah satu informan, bahwa kebijakan di bidang pendidikan yakni gerakan penuntasan wajib belajar 12 tahun telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Menurut Sekretaris daerah Kab. Pangkep Drs. H. Effendi Kasmin, mengatakan bahwa:

“Upaya pemerintah dalam memenuhi hak dasar setiap masyarakat terus dimaksimalkan pada bidang pendidikan, salah satunya yakni penuntasan wajib belajar 12 tahun. Namun, meski pemerintah telah berupaya meringankan kebutuhan masyarakat, jika tidak dibarengi dengan tanggapan positif oleh masyarakat, maka hasilnya juga akan nihil. Hal ini dikarenakan masih adanya pemikiran masyarakat yang menilai pendidikan itu sangat mahal dan dengan pendidikan tidak menjamin kehidupan yang lebih layak”. (wawancara Selasa 18 Juli 2017, pukul 13:47)

Salah satu indikator mutu pendidikan dilihat dari aspek peningkatan akses dan pemerataan pendidikan adalah jika jumlah anak yang tidak dan atau putus sekolah khususnya jenjang pendidikan dasar mencapai 0%. Jika indikator ini menjadi kesepakatan, maka mesti ada upaya gerakan secara kolektif masyarakat dengan pemerintah untuk memberantas atau memerangi anak tidak dan atau putus sekolah. Berdasarkan pengamatan penulis, nampaknya permasalahan pendidikan telah menjadi salah satu program prioritas dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Pangkep. Hal ini berangkat dari visi misi pembangunan, yang menfokuskan pada peningkatan dan pelayanan pendidikan sebagai hak dan kebutuhan dasar masyarakat. Namun dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tak akan berarti tanpa adanya kesadaran oleh setiap masyarakat akan pentingnya pendidikan dan merupakan hak dan kebutuhan setiap orang untuk mengenyam pendidikan.

Pemerintah dan segenap warganya mesti bertanggung jawab terhadap pembangunan bidang pendidikan khususnya meminimalkan anak putus dan atau tidak sekolah. Jika penuntasan anak putus dan atau tidak sekolah diaktualisasikan menjadi gerakan bersama, maka

diharapkan semua elemen dalam masyarakat akan menjadikan anak yang tidak dan atau putus sekolah menjadi tanggung jawab bersama dan menjadikannya sebagai masalah sosial yang harus diselesaikan bersama oleh setiap elemen yang terkait.

2) Bantuan dana pendidikan

Pemerintah Kabupaten Pangkep telah berupaya dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pangkep. Salah satu indikator paling penting guna peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pangkep yakni penganggaran untuk membantu proses peningkatan kualitas terutama disektor pendidikan, dan diharapkan dapat membantu untuk mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi masalah biaya pendidikan, sehingga dapat mengatasi anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Pangkep. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan keterlibatan semua unsur dan elemen masyarakat yang ada.

Untuk tahun 2016 pemerintah mengalokasikan anggaran Dana BOS (Bantuan Operasional Pendidikan) yang cukup besar ke Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, yakni berkisar 2,5 Miliar lebih. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep Drs. H. Mohammad Ridwan, M.Pd. mengatakan:

“Besarnya alokasi anggaran yang telah digelontorkan Pemerintah Pusat dan Daerah disektor pendidikan membuktikan keseriusan dan besarnya perhatian pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pangkep, dimana hal tersebut telah menjadi Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Pangkep dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat, yakni hak atas layanan dan peningkatan pendidikan”. (wawancara Rabu 19 Juli 2017, pukul 09:47)

Program tersebut tentunya sangat sesuai dengan arah kebijakan sektor pendidikan yang mengarah kepada peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat akan pendidikan. Secara umum pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan membuat arah kebijakan pendidikan tersebut untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera dengan membangun keunggulan komparatif dan kompetitif di masing-masing wilayah dan didukung oleh kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas atau dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi tanpa dipungut biaya.

Anggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Pangkep ini jumlahnya terbilang sangat besar. Data di Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep menyebutkan anggaran dana bos untuk kecamatan liukang tangaya tingkat sekolah dasar sebesar Rp 2.523.200.000,-. Dana

tersebut dialokasikan kepada siswa Sekolah Dasar yang berjumlah 3.154 siswa, dengan rincian persisiwanya sebesar Rp. 800.000 untuk SD pertahunnya. Secara khusus, anggaran dana BOS digunakan untuk:

- a) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih.
 - b) Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik disekolah negeri maupun swasta.
- 3) Pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin

Diantara faktor-faktor penyebab anak tidak dan atau putus sekolah, kiranya faktor ekonomi terkadang menjadi faktor yang paling sering ditemui. Permasalahan kemiskinan sebagai faktor utama penyebab anak tidak dan atau putus sekolah, maka optimalisasi pemberian beasiswa menjadi alat alternatif kebijakannya. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Pangkep Drs. H. Mohammad Ridwan, M.Pd. yang mengatakan:

“Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam hal ini Dinas Pendidikan atau Sekolah terkait telah mengoptimalkan dari segi pendataan siswa yang seharusnya dan selayaknya mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi untuk meringankan beban orang tua dan sebagai upaya pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pendidikan”. (wawancara Rabu 19 Juli 2017, pukul 09:47)

4) Program BSM (Bantuan Siswa Miskin)

Teridentifikasinya anak yang tidak dan atau putus sekolah baik karena faktor ekonomi dan jarak maka Program Bantuan Siswa Miskin menjadi alternatif lain selain optimalisasi beasiswa. Program BSM merupakan program nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan disetiap daerah dengan maksud untuk mengamankan upaya jangka panjang guna memutus rantai kemiskinan dengan memastikan masyarakat miskin bisa mengakses pendidikan, sehingga mutu sumber daya manusia Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Pangkep pada khususnya terus meningkat dan mampu bersaing dalam era masyarakat global. Program ini bertujuan :

- a) Untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak;

- b) Mencegah siswa putus sekolah karena ketiadaan biaya;
- c) Membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran;
- d) Mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat Sekolah Menengah Atas); serta
- e) Membantu kelancaran program sekolah.

Siswa Penerima BSM ini berasal dari keluarga yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang memiliki anak usia sekolah. Dana BSM yang diberikan kepada siswa mulai dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK hingga perguruan tinggi melalui mekanisme transfer langsung ke rekening siswa dari bank pelaksana yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa, karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan berdasarkan prestasi (beasiswa) mempertimbangkan kondisi siswa, sedangkan beasiswa diberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa. Dana BSM diberikan kepada siswa mulai dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi dengan besaran sebagai berikut:

- a) BSM SD & MI sebesar Rp 225.000 per semester atau Rp 450.000 per tahun.

b) BSM SMP/MTs sebesar Rp 375.000 per semester atau Rp 750.000 per tahun.

c) BSM SMA/SMK/MA sebesar Rp 500.000 per semester atau Rp 1.000.000 per tahun.

5) Sosialisasi kepada masyarakat

Selain mengeluarkan kebijakan dan program di bidang pendidikan pemerintah daerah juga gencar dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya pembinaan terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan penjelasan mengenai pentingnya serta manfaat dari proses pendidikan/bersekolah kepada masyarakat melalui proses sosialisasi. Kondisi anak yang tidak dan putus sekolah karena perhatian orang tua yang kurang dan faktor budaya dapat di atasi melalui pendekatan tertentu oleh pemerintah daerah. Kurangnya perhatian dapat disebabkan karena rendahnya kesadaran orang tua tentang arti penting pendidikan. Begitu juga dengan faktor budaya. Faktor budaya yang dimaksudkan adalah adanya pandangan yang kurang tepat pendidikan yaitu, pendidikan belum tentu menjamin kehidupan yang lebih layak. Sebab, banyak anak-anak tidak memiliki latar belakang pendidikan tetapi dapat hidup layak.

Upaya mengatasi kondisi di atas, selain melakukan pembinaan maka pemerintah melakukan kampanye pendidikan yang telah bekerja sama dengan perangkat pemerintahan yang ada di Kecamatan dan Kelurahan/Desa berupa sosialisasi dan penyediaan taman baca di setiap kelurahan/desa dalam rangka memberikan pemahaman dan motivasi kepada masyarakat dan terkhusus bagi setiap orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi setiap individu dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, pemerintah daerah dapat mensosialisasikan kebijakan strategis terutama di bidang pemerataan dan perluasan akses, misalnya subsidi pendidikan gratis, penyaluran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), program penuntasan wajib belajar 12 tahun. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran orang tua dalam menyekolahkan anak-anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa tentunya dibutuhkan tingkat partisipasi masyarakat dalam hal memahami manfaat dan pentingnya proses pendidikan yakni bersekolah melalui

program-program yang ada. Dengan adanya sosialisasi tentang manfaat dan fungsi sekolah diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat mengenai pendidikan yang selama ini masyarakat menganggap bahwa pendidikan itu masih mahal bagi mereka yang perekonomian lemah dan hidup berkekurangan serta anggapan bahwa orang yang sekolah nantinya akan menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) akan dianggap menjadi orang yang sukses. Jika tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, maka anak yang sekolah hanya membuang tenaga, biaya dan waktu saja. Selain itu pemerintah juga berkewajiban memberikan bantuan berupa dana bagi masyarakat miskin dalam upaya mengatasi beban masyarakat terhadap biaya pendidikan. Beberapa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pangkep diatas, dalam menekan angka anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Pangkep, menurut penulis kebijakan penuntasan wajib belajar 12 tahun dalam bentuk surat edaran Pemerintah Kabupaten Pangkep dengan berbagai program pendukungnya yang belum terealisasikan secara optimal, hal ini terjadi karena masih adanya kondisi anak yang putus sekolah di Kabupaten Pangkep. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara pihak pemerintah daerah yang terkait dalam hal ini Kecamatan maupun Desa/Lurah dengan Dinas Pendidikan menjadi faktor

utama dalam mensosialisasikan penuntasan wajib belajar 12 tahun sebagai bentuk pentingnya pendidikan bagi setiap anak untuk peningkatan kualitas masyarakat yang belum merata, terlihat dari masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut. Pada penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di setiap sekolah, perlu adanya peningkatan pengawasan dari tim Pengawas yang telah dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep dalam melihat laporan penggunaan dana BOS oleh setiap Sekolah dan mencocokkan dengan apa yang ada di lapangan, sehingga penggunaan dana BOS itu sendiri sesuai dengan tujuannya. Hal ini dimaksudkan agar dalam penggunaan dana BOS itu sendiri tidak terdapat penyalahgunaan. Selain itu, dalam pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin dan bantuan siswa miskin (BSM) harus dilakukan pendataan yang obyektif bagi setiap masyarakat yang seharusnya dan selayaknya menerima dan diberikan secara merata bagi setiap masyarakat. Jadi menurut penulis Pemerintah Kabupaten Pangkep yakni Dinas Pendidikan dan setiap elemen terkait agar melakukan pendataan yang obyektif serta merata bagi masyarakat miskin yang memang pantas untuk menerima bantuan tersebut demi mengurangi beban orang tua untuk menjamin hak dasar setiap anak untuk bersekolah dan hak masyarakat akan pendidikan.

Serta dalam pembangunan taman baca pada akhir tahun 2014 yang dilaksanakan di setiap balai desa yang bertujuan sebagai wadah dalam rangka memberikan pemahaman dan motivasi kepada masyarakat dan terkhusus bagi setiap orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi setiap individu, harus dilaksanakan secara merata demi pemerataan pendidikan yang ada di Kabupaten Pangkep.

b. Faktor-faktor yang Menyebabkan Anak Putus Sekolah

Kondisi anak putus sekolah yang terjadi di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep cukup memprihatinkan bagi setiap orang terutama bagi pemerintah daerah. Hal tersebut senada dengan penjelasan Kadis Pendidikan Pangkep, Drs. H. Mohammad Ridwan, M.Pd saat diwawancarai di ruangannya (Rabu, 19 Juli 2017, pukul 09:47)

“Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, beberapa faktor penyebab anak putus sekolah, yakni: Kurangnya minat anak untuk bersekolah, Lemahnya ekonomi keluarga, Teman sepeergaulan, Kondisi lingkungan tempat tinggal anak, dan Pernikahan dini, serta Pandangan masyarakat akan pendidikan”. “Oleh karenanya, kami dari dinas pendidikan dan pemerintah menyusun beberapa program dan kebijakan dalam menanggulangnya, yakni: kebijakan di bidang pendidikan, bantuan dana pendidikan, Pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, program bantuan siswa miskin, dan sosialisasi kepada masyarakat”

Pendidikan formal membutuhkan proses belajar mengajar di bangku sekolah dan beberapa jenjang atau tingkat pendidikan mulai dari tingkat SD (Sekolah Dasar), SMP

(Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas) dan Perguruan Tinggi. Namun dalam proses pendidikan secara formal belum dapat terealisasi secara maksimal disebabkan karena masih adanya kondisi anak putus sekolah Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan, jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Pangkep.

Berikut ini data perbandingan anak putus sekolah dengan anak sekolah yang ada di Kabupaten Pangkep:

Tabel 4.4 Perbandingan Anak Sekolah dan Anak Putus Sekolah di Kec. Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep tingkat SD Tahun 2016

| No | Tingkat Pendidikan | Usia (Tahun) | Jumlah | | |
|----|--------------------|--------------|--------------------|--------------|---------|
| | | | Anak Putus Sekolah | Anak Sekolah | Sekolah |
| 1 | Sekolah Dasar | 6-11 / 7-12 | 98 | 3154 | 27 |

Sumber Data : UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Liukang Tangaya.

Berdasarkan table 4.5 angka anak putus sekolah terjadi pada pada tingkat SD (Sekolah Dasar) sebesar 89 anak dan anak yang sekolah sebesar 3154 anak. Keadaan sarana dan prasarana yakni jumlah sekolah di setiap tingkat pendidikannya sekiranya sangat memudahai, namun kondisi anak putus sekolah dapat disebabkan karena beberapa faktor yang akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

Kasus anak putus sekolah tentunya tidak akan terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhi anak sekolah sehingga tidak dapat menyelesaikan sekolah yang wajar saja terjadi karena anak dihadapkan oleh beberapa kendala, baik yang datang dari diri sendiri maupun yang datang dari luar diri anak seperti lingkungan dan sebagainya. Berikut ini penulis akan memaparkan kasus mengenai kondisi anak putus sekolah yang terjadi di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep:

Pertama, kasus yang terjadi di SDN 18 Tinggalungan, Kelurahan Sapuka, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep. Berdasarkan wawancara dengan pihak sekolah, dalam hal ini Irwan Ridwan A.Ma selaku kepala sekolah SDN 18 Tinggalungan (Sabtu 22 Juli 2017, Pukul 09:38 WITA). Penulis mengetahui bahwa terdapat seorang anak yang putus sekolah, yakni siswa kelas 5 atas nama Arman disebabkan minat anak untuk bersekolah yang tiba-tiba hilang. Dari apa yang diketahui pihak sekolah, hal dikarenakan lingkungan sekolah yang dianggap sangat membosankan dan kurangnya siswa di sekolah tersebut “Pihak sekolah yang telah berusaha memberikan pemahaman terhadap orang tua dalam hal ini ibu dari Arman agar anaknya dapat kembali bersekolah seperti teman sebayahnya, namun tidak ada respon apapun dari ibu Arman”, jelas Irwan Ridwan A.Ma. saat diwawancarai.

Kedua, kasus yang terjadi di SDN 14 Makarangang. Berdasarkan wawancara dengan pihak sekolah dalam hal ini Syamsuddin, S.Pd selaku Kepala Sekolah (Senin 24 Juli 2017, pukul 10.45), penulis mengetahui bahwa di SDN 14 Makarangang terdapat satu anak yang DO (*Drop Out*) atau putus sekolah di kelas IV (empat). Anak yang DO (*Drop Out*) pada kelas IV (empat) atas nama Firman dikarenakan minat anak untuk bersekolah tidak ada lagi yang awalnya anak tersebut sering membolos sekolah yang kemudian anak tidak ingin lagi untuk bersekolah seperti selayaknya anak seusianya atau teman sebayahnya yang harusnya masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar.

Ketiga, kasus yang terjadi di Dusun Langkoitang, Desa Balo-baloang Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep, tepatnya yang terjadi pada keluarga Bapak Ibrahim dan Ibu Endang yang memiliki 3 orang anak (3 laki-laki) dimana anak pertamanya tidak menyelesaikan pendidikannya di tingkat Sekolah Dasar, anak keduanya hanya menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar, anak ketiganya mengenyam pendidikan di tingkat sekolah dasar. Saat diwawancarai pada Rabu 26 Juli 2017/Pukul 10.25, Ibu Endang menjelaskan bahwa anaknya terpaksa berhenti sekolah dan anaknya yang hanya menyelesaikan pendidikan di tingkat

Sekolah Dasar, dikarenakan lemahnya ekonomi keluarga, dimana suaminya yang hanya bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan yang tidak tetap serta keadaan suaminya yang tidak sesehat dulu lagi untuk lebih sering turun menangkap ikan, sehingga anak pertama dan kedua lebih memilih untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga daripada melanjutkan atau menyelesaikan pendidikan mereka.

Keempat, kasus yang terjadi di Desa Sailus Besar, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep ini terdapat beberapa keluarga yang anaknya putus sekolah. Salah satunya terjadi pada Sangkala anak Ketiga dari 4 bersaudara dari Bapak Sinrang dan Ibu Sittiara yang mengenyam pendidikan di SDN 6 Sailus Besar, saat diwawancarai (Kamis 27 Juli 2017, pukul 13:29) Ibu Sittiara menjelaskan hal ini dikarenakan di lingkungan tempat tinggalnya dimana anaknya sehari-harinya bergaul dengan beberapa anak yang memang tidak bersekolah serta tidak seumuran dengannya yang menyebabkan dia sering membolos sekolah serta terpengaruh dengan gaya hidup temannya yang merokok dan sering mengonsumsi minuman beralkohol, sehingga lama-kelamaan berdampak pada keinginan anak untuk tidak bersekolah lagi.

Kelima, kasus anak putus sekolah yang terjadi di Desa Sabaru ini terdapat beberapa keluarga yang memiliki anak

putus sekolah. Salah satunya yang terjadi pada keluarga bapak Abd. Tholib dan Ibu Hasni yang memiliki 3 orang anak laki-laki, dimana anak pertama dan kedua hanya menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar, sedangkan anak ketiganya yang sementara mengenyam pendidikan di kelas 6 SDN Sabaru terpaksa berhenti. Saat diwawancarai pada pukul 11.35 / Jum'at 28 Juli 2017, Bapak Tholib mengaku bahwa anak-anaknya terpaksa putus sekolah karena dia kurang mempunyai dalam hal biaya. Walau pemerintah telah memberikan berbagai bentuk bantuan seperti dana BOS, beasiswa bagi keluarga miskin para orang tua mengeluh akan tingginya pembiayaan yang terkait dengan aspek biaya yang harus dikeluarkan untuk menyekolahkan anak-anak mereka seperti biaya untuk kebutuhan pribadi anak yang bersekolah seperti baju seragam, sepatu, tas, buku, alat tulis dan tambahan uang jajan pada saat anak-anaknya bersekolah. Apalagi pekerjaannya yang hanya sebagai Nelayan tradisional dengan penghasilan yang tidak menentu dalam perharinya dirasa masih sangat kurang dalam memenuhi biaya hidup sehari-hari keluarganya dan ditambah lagi harus memenuhi kebutuhan atau keperluan sekolah anak-anaknya. Selain itu setelah tamat dari sekolah, anak-anaknya belum tentu bisa menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau mendapatkan pekerjaan yang tetap ataupun lebih layak. Maka

dari itu anak-anaknya lebih memilih untuk bekerja nelayan atau ikut ke juragan-juragan kapal sebagai ABK untuk menghasilkan uang dari pada melanjutkan sekolahnya. Hal ini tentunya dapat meringankan beban orang tuanya serta dapat menambah penghasilan dan mengatasi kesulitan biaya hidup keluarganya.

Keenam, kasus yang terjadi di Dusun Kembang Lemari, Kelurahan Sapuka. Tepatnya di SDN 24 Kembang Lemari. Berdasarkan wawancara langsung dengan Kepala Sekolah, yakni ibu H. Asrianti K, S.Pd (Sabtu 29 Juli 2017, pukul 10:26) menjelaskan bahwa di SDN 24 Kembang Lemari terdapat beberapa anak putus sekolah pada kelas VI (enam), bahkan menjelang ujian akhir. Dari pihak sekolah dalam mekanisme untuk menetapkan seorang anak DO (*Drop Out*) atau berhenti dari sekolah harus dengan pernyataan dari sang anak yang diketahui oleh orang tuanya dan dengan alasan apa hingga berhenti bersekolah. Pertama pihak sekolah biasa menyurati orang tua siswa, kemudian disusul surat pemanggilan kepada orang tua siswa. Jika hal tersebut dihiraukan, barulah pihak sekolah melakukan kunjungan kerumah orang tua siswa untuk mengetahui kenapa anak tidak ingin lagi melanjutkan pendidikan, lebih banyak persoalannya terdapat pada orang tua yang menikahkan anak mereka bagi perempuan dan mengajak anak mereka melaut bagi laki-laki.

Berdasarkan dari beberapa kasus anak putus sekolah di Kabupaten Pangkep yang dilampirkan oleh penulis dengan mengambil example di beberapa pulau di Kec. Liukang tangaya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi anak putus sekolah, yakni:

1. Kurangnya minat anak untuk bersekolah.
2. Lemahnya ekonomi keluarga.
3. Teman sepergaulan.
4. Kondisi lingkungan tempat tinggal anak.
5. Pernikahan dini.
6. Pandangan masyarakat akan pendidikan.

B. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, diketahui terdapat beberapa peranan pemerintah pangkep, dalam hal ini dinas pendidikan dalam menekan angka anak putus sekolah, yakni (1) kebijakan di bidang pendidikan; (2) bantuan dana pendidikan; (3) Pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin; (4) program bantuan siswa miskin; dan (5) sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan faktor-faktor peyebab anak putus sekolah, yakni (1) Kurangnya minat anak untuk bersekolah; (2) Lemahnya ekonomi keluarga; (3) Teman sepergaulan; (4) Kondisi lingkungan tempat tinggal anak; (5) Pernikahan dini; (6) Pandangan masyarakat akan pendidikan.

Dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa tentunya dibutuhkan tingkat partisipasi masyarakat dalam hal memahami manfaat dan pentingnya proses pendidikan yakni bersekolah melalui program-program yang ada. Hal tersebut sesuai dengan yang dipaparkan oleh kepala dinas pendidikan pangkep, Bapak Drs. H. Mohammad Ridwan, M.Pd. "Program-program kami juga akan efektif, jika masyarakat mendukung program tersebut" (Selasa 18 Juli 2017, pukul 10:47). Berikut penulis memaparkan peranan pemerintah pangkep, dalam hal ini program dinas pendidikan pangkep di kecamatan liukang tangaya sesuai hasil temuan penulis.

Pertama, kebijakan di bidang pendidikan, salah satunya gerakan wajib belajar 12 tahun dalam bentuk surat edaran bupati yang telah diberikan kepada setiap perangkat pemerintahan yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa, untuk kemudian disosialisaikan dan memberikan pemahaman kepada setiap masyarakat. Hal tersebut bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan, diketahui dari beberapa pernyataan masyarakat dari beberapa pulau, salah satunya bapak H. Syamsul dg Liu dari pulau/dusun langkoitang desa balo-baloang mengatakan "kami tidak pernah mendapat informasi tentang wajib belajar 12 tahun, apalagi yang disosialisasikan oleh desa atau pemerintah setempat" (Rabu 26 Juli 2017/Pukul 08.51).

Kedua, Bantuan dana pendidikan, dana pendidikan yang dimaksud ialah dana BOS. Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

yang diambil dari APBN dianggarkan untuk pendidikan, diperuntukkan untuk sekolah-sekolah dengan tujuan dapat membantu untuk mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi masalah biaya pendidikan. Berdasarkan wawancara langsung dengan Kepala Sekolah, yakni ibu H. Asrianti K, S.Pd. (Sabtu 29 Juli 2017, pukul 14:26) menjelaskan bahwa telah menerima dana BOS sebesar Rp. 60.000.000,- untuk tahun ajaran 2017-2018, yang kemudian menopang dalam hal pembangunan dan pelayanan semoga ini mampu menunjang sumber daya manusia sebagai tenaga pengajar dalam mengurangi angka anak putus sekolah.

Ketiga, Pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, dan Bantuan Siswa Miskin merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah daerah pangkep dan program nasional untuk siswa yang Permasalahan kemiskinan sebagai faktor utama penyebab anak tidak dan atau putus sekolah, Namun program ini dinilai kurang efektif. Hal senada juga disampaikan bapak Sirajuddin, penduduk Kelurahan sapuka, dan merupakan orang tua siswa (M. Irwan) salah seorang siswa kelas V, SDN 28 sapuka saat diwawancarai langsung di rumahnya (Minggu minggu Juli 2017, pukul 09:13), “Beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin masih salah sasaran atau kurang efektif, buktinya anak saya sampai hari ini masih bersekolah hanya berseragam dari baju bekas pemberian tetangga” jelas bapak Sirajuddin. Namun pernyataan berbeda dari Kepala SDN 4 Sapuka,

bapak Irham Zahri, S.Pd., M.Pd saat diwawancarai langsung dirumahnya (Minggu minggu Juli 2017, pukul 15:35), ia menjelaskan bahwa bantuan ataupun beasiswa tersebut terkadang menuai kontra, disebabkan pendataan yang kurang tepat dan bilamana siswa telah memperoleh bantuan namun tidak dipergunakan kebutuhan sekolahnya, jadi orang tua juga memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan kepada anak-anaknya agar tidak menuai sorotan.

Keempat, sosialisasi kepada masyarakat, yang dimaksud ialah pemerintah setempat atau dari pihak sekolah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat tentang pentingnya pendidikan. Kegiatan ini telah beberapa kali dilaksanakan oleh pihak sekolah maupun pihak pemerintah setempat, hal tersebut sesuai dengan pernyataan dengan penjelasan bapak Abd. Latif, seorang ayah dari siswa kelas III di SDN 28 Sapuka (Musbar), "kami telah menghadiri 3 kali pertemuan dengan pak Lurah sapuka dan pihak sekolah yang dilaksanakan di sekolah, dalam pertemuan tersebut Pak Lurah dan Kepala Sekolah memaparkan tujuan pendidikan, fungsi pendidikan dan alasan kenapa anak-anak harus bersekolah." (Minggu minggu Juli 2017, pukul 08:22)

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa tentunya dibutuhkan tingkat partisipasi masyarakat dalam hal memahami manfaat dan pentingnya proses

pendidikan yakni bersekolah melalui program-program yang ada. Dengan adanya sosialisasi tentang manfaat dan fungsi sekolah diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat mengenai pendidikan yang selama ini masyarakat menganggap bahwa pendidikan itu masih mahal bagi mereka yang perekonomian lemah dan hidup berkekurangan serta anggapan bahwa orang yang sekolah nantinya akan menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) akan dianggap menjadi orang yang sukses. Jika tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, maka anak yang sekolah hanya membuang tenaga, biaya dan waktu saja. Selain itu pemerintah juga berkewajiban memberikan bantuan berupa dana bagi masyarakat miskin dalam upaya mengatasi beban masyarakat terhadap biaya pendidikan. Beberapa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pangkep diatas, dalam menekan angka anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Pangkep, menurut penulis kebijakan penuntasan wajib belajar 12 tahun dalam bentuk surat edaran Pemerintah Kabupaten Pangkep dengan berbagai program pendukungnya yang belum terealisasikan secara optimal, hal ini terjadi karena masih adanya kondisi anak yang putus sekolah di Kabupaten Pangkep. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara pihak pemerintah daerah yang terkait dalam hal ini Kecamatan maupun Desa/Lurah dengan Dinas Pendidikan menjadi faktor utama dalam mensosialisasikan penuntasan wajib belajar 12 tahun sebagai bentuk pentingnya pendidikan bagi setiap anak untuk peningkatan

kualitas masyarakat yang belum merata, terlihat dari masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut. Pada penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di setiap sekolah, perlu adanya peningkatan pengawasan dari tim Pengawas yang telah dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep dalam melihat laporan penggunaan dana BOS oleh setiap Sekolah dan mencocokkan dengan apa yang ada di lapangan, sehingga penggunaan dana BOS itu sendiri sesuai dengan tujuannya. Hal ini dimaksudkan agar dalam penggunaan dana BOS itu sendiri tidak terdapat penyalahgunaan. Jadi menurut penulis Pemerintah Kabupaten Pangkep yakni Dinas Pendidikan dan setiap elemen terkait agar melakukan pendataan yang obyektif serta merata bagi masyarakat miskin yang memang pantas untuk menerima bantuan tersebut demi mengurangi beban orang tua untuk menjamin hak dasar setiap anak untuk bersekolah dan hak masyarakat akan pendidikan.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai tujuan akhir dari suatu penelitian yang dikemukakan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya. Dari hasil kesimpulan ini akan dikemukakan pula beberapa saran sebagai rekomendasi bagi penerapan dan pengembangan hasil penelitian.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya maka diperoleh beberapa program, kebijakan, ataupun peran pemerintah dalam menangani angka anak putus sekolah tingkat SD di Kecamatan Liukang Tangaya ialah sebagai berikut: (1) kebijakan di bidang pendidikan; (2) bantuan dana pendidikan; (3) Pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin; (4) program bantuan siswa miskin; dan (5) sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan faktor-faktor penyebab anak putus sekolah, yakni (1) Kurangnya minat anak untuk bersekolah; (2) Lemahnya ekonomi keluarga; (3) Teman sepergaulan; (4) Kondisi lingkungan tempat tinggal anak; (5) Pernikahan di usia dini; (6) Pandangan masyarakat akan pendidikan.

Namun, dari peran pemerintah di atas, terdapat beberapa yang belum efektif, yakni: bantuan dana pendidikan, Pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, program bantuan siswa miskin.

Hal tersebut dikarenakan, antara lain: pendataan yang belum akurat sehingga masih ada beberapa orang yang seharusnya menerima namun belum menerimanya, akses dari ibu kota Kabupaten ke Kecamatan Liukang Tangaya masih sangat minim, dan pengawasan orang tua bagi penerima bantuan kepada anaknya yang belum efisien sehingga melenceng tujuan awal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan di atas, sehingga penulis merekomendasikan beberapa saran, yakni:

1. Untuk memaksimalkan peran pemerintah dalam mengurangi angka anak putus sekolah di Kecamatan Kiukang Tangaya maka mesti ada upaya gerakan secara kolektif pemerintah dengan masyarakat untuk memberantas atau memerangi anak tidak dan atau putus sekolah.
2. Kepada pihak sekolah ataupun pemerintah setempat yang diberikan tanggung jawab dalam menjalankan program atau peran pemerintah dalam mengurangi angka anak putus sekolah di Kecamatan Kliukang Tangaya sesuai dengan mekanisme yang ada, khususnya dalam pemberian berupa bantuan harus memperhatikan kembali data di lapangan dan yang dilaporkan.
3. Kepada orang tua sepatutnya melakukan pengawasan ketat terhadap anak-anak mereka sehingga penggunaan bantuan dari pemerintah benar-benar dipergunakan sesuai tujuan awal, dan

bekerjsama dengan pemerintah dalam mengurangi angka anak putus sekolah di Kecamatan Liukang Tangaya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nazili Shaleh. 2011. *Pendidikan dan Masyarakat*. Repository@UPI: Yogyakarta.
- Ahmadi, Hasan. 1990. *Strategi Belajar Mengajar Keterampilan berbahasa dan Apresiasi Sastra*. Yayasan (UPI) : Malang.
- Aldefer, H.F.1964. *Local Government Indeveloping Countries*. Mc. Graw Hill: New York
- Ardhana, dan Lexy. J. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya : Bandung.
- Badan Pusat Statistik, *2017 Data Jarak Pulau-Pulau Kecamatan Liukang Tangaya di Pangkep*.
- C.S.T. Kansil, S.H, Drs. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. PN. Balai Pustaka: Jakarta.
- Darminto, Dwi Prasrtowo dan Rifka Julianty. 2002. *Analisis Laporan Keuangan*. N Mega Jaya : Yogyakarta.
- Damayanti, Whanty. 2006. *Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kecerdasan Anak Didik Pada Lembaga Pendidikan Swasta Di Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara*. Program Studi Ilmu Pemerintahan: Universitas Hasanuddin.
- Dewantara, ki Hajar. 2014. *Karya K.H. Dewantara, Bagian Pertama: Pendidikan*. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa: Yogyakarta.
- Dien Indra Kusuma, Amin. 1973. *Pengantar Ilmu pendidikan*. Usaha Nasional: Surabaya.
- Drijakarya, N. 1980. *Drijakarya Tentang Pendidikan*. Kanisius: Yogyakarta
- Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Gunawan, Ary. H. 2010. *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Hasbullah. 2010. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Rajawali Pers: Jakarta.

- Hazairin. 1973. *Demokrasi Pancasila*. Tintamas: Jakarta.
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa. 2003. *Dimensi Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Kabid Bapeda Pangkajene dan Kepulauan, 2017 Peta Kecamatan Liukang Tangaya di Pangkep*
- Karim, M. Rusli. 1991. *Budaya Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kencana Syafi'ie, Inu. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Bandung: Refika Aditama.
- Kurniawan, Aris. (2015). "13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli Dunia".[Online]. Tersedia: www.gurupendidikan.co.id yang direkam pada tanggal 13 Juni 2015. [13 September 2017]
- Logemann. 1954. *Het Staatsrecht Van Indonesia*. Bandung: N.VUTEvriijk W. Van Hoeve.
- Mudyahardjo, Redja. 2012. *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Moleong, lexy. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Pt Remaja rosdakarya: Bandung.
- Nasution,S. 2010. *Sosiologi Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Teori Budaya Organisasi*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Saleh, Hasrat Arief dkk. 2013. *Pedoman Penulisan Proposal (Usulan Penelitian) & Skripsi*.
- Sarundajang, S.H. 2011. *Babak Baru Sistem Pemerintahan*. Kata Hasta Pustaka. Jakarta.
- Siagian, S.P. 1986. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1994. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Alfabeta: Bandung.

Suharto,Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat "Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial"*. Refika Aditama: Bandung.

Sumarjono, Selo. 1974. *Sistem Sosial Indonesia*. Rineka Cipta: Yogyakarta.

Syafaruddin dan Anzizhan. 2004. *Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan*. Grasindo: Jakarta.

Tim Prima Pena. 2006. *Kamus Ilmiah Populer*. Gitamedia Pres: Jakarta.

Tjokroaminoto,Bintoro. 2004. *Pengantar Ilmu Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Toha, Mifta. 1983. *Perilaku Organisasi*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

UPTD, Dinas Pendidikan Kecamatan Liukang Tangaya, 2017 Tentang Data Rekapitulasi Siswa SD di Kecamatan LiuKng Tangaya di Pangkep

UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Liukang Tangaya, 2014 Tentang Kondisi Anak Putus Sekolah di Pangkep..

Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.

UUD 1945 Pasal 31: 1. Hak Asasi Manusia

UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah

UU No. 20 tahun 2003, Bab: II Pasal 4 pendidikan Nasional.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Widodo, Joko. 2001. *Good governance, Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. CV. Citra Media: Surabaya.

Yanti. T, Friska. 2015. *Faktor-faktor Penyebab Anak Putus Sekolah dasar Di Desa Bukit Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi*. Skripsi. FIS, Sosiologi, Universitas Riau: Pekanbaru.





Pengambilan data di pemda pangkep



Perjalanan menuju pulau tinggalingan



Wawan cara di bapeda pangkep



peta kecamatan Liukang tangaya



Pengambilan data di kantor BPS Pangkep

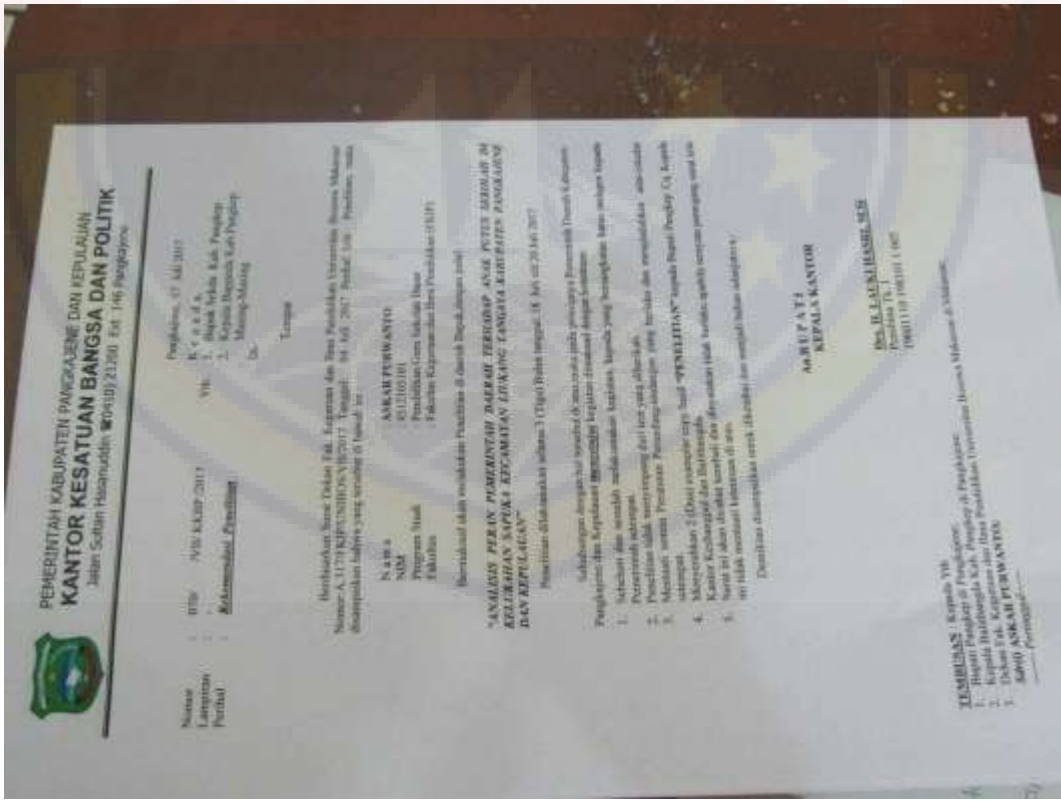


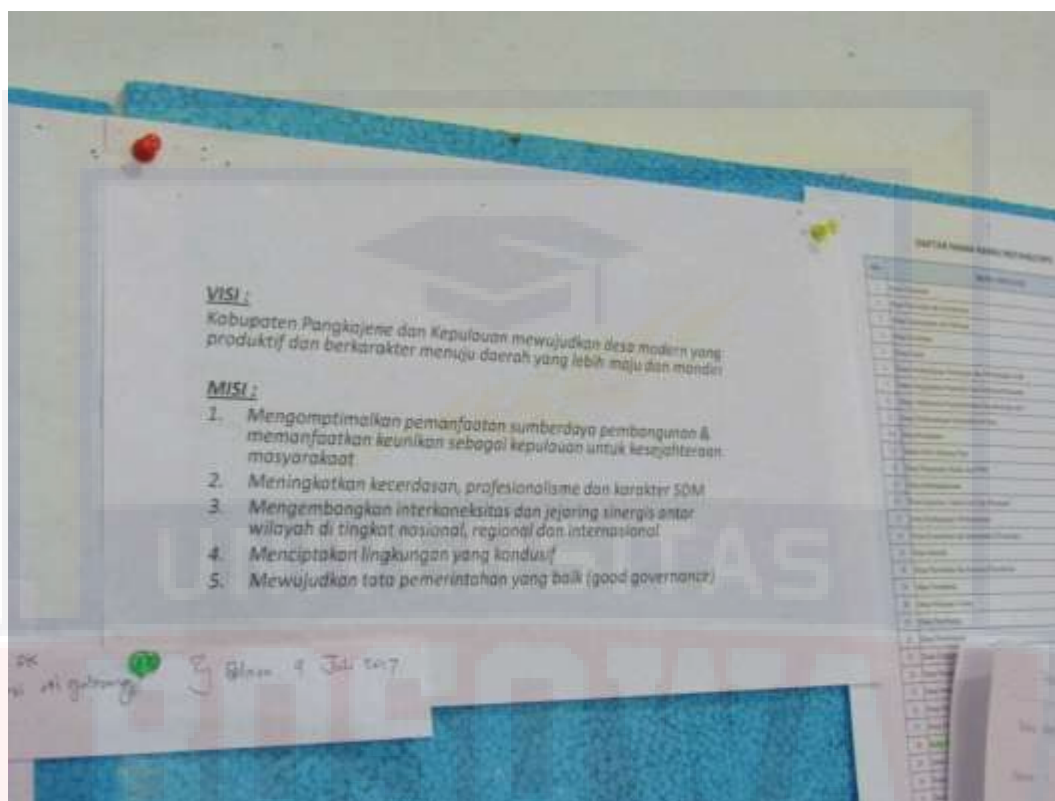
Wawancara dengan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Liukang Tangaya





UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Liukang Tangaya





Poto Visi Misi Kab. Pangkep



BIP WNI Kab. Pangkep Kec. Liukang Tangaya

**REKAPITULASI DATA SISWA SD NEGERI SE KECAMATAN LIUKANG TANGAYA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

| No | Nama Sekolah | Jumlah Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah | |
|---------------|----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | | Kelas 1 | | | Kelas 2 | | | Kelas 3 | | | Kelas 4 | | | Kelas 5 | | | Kelas 6 | | | | |
| | | L | P | Jmlh | L | P | Jmlh | L | P | Jmlh | L | P | Jmlh | L | P | Jmlh | L | P | Jmlh | L | P |
| 1 | SDN. 1 Sabaru | 13 | 11 | 24 | 18 | 5 | 23 | 8 | 20 | 28 | 15 | 18 | 33 | 14 | 15 | 29 | 14 | 3 | 17 | 82 | |
| 2 | SDN. 2 Balo-Baloang | 9 | 8 | 17 | 16 | 12 | 28 | 14 | 8 | 22 | 22 | 9 | 31 | 10 | 14 | 24 | 14 | 13 | 27 | 85 | |
| 3 | SDN. 4 Sapuka | 25 | 11 | 36 | 19 | 23 | 42 | 13 | 17 | 30 | 26 | 12 | 38 | 16 | 12 | 28 | 23 | 17 | 40 | 122 | |
| 4 | SDN. 5 Tampaang | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 15 | 2 | 1 | 3 | 27 | |
| 5 | SDN. 6 Sailus Besar | 6 | 9 | 15 | 15 | 13 | 28 | 17 | 10 | 27 | 21 | 10 | 31 | 12 | 23 | 35 | 13 | 14 | 27 | 84 | |
| 6 | SDN. 9 Sumanga | 12 | 21 | 33 | 13 | 24 | 37 | 19 | 12 | 31 | 16 | 15 | 31 | 17 | 17 | 34 | 12 | 13 | 25 | 89 | 1 |
| 7 | SDN. 10 Sabalana | 9 | 4 | 13 | 6 | 13 | 19 | 7 | 7 | 14 | 5 | 7 | 12 | 5 | 14 | 19 | 9 | 12 | 21 | 41 | |
| 8 | SDN. 11 Langkoitang | 16 | 12 | 28 | 11 | 10 | 21 | 6 | 7 | 13 | 17 | 11 | 28 | 14 | 6 | 20 | 8 | 6 | 14 | 72 | |
| 9 | SDN. 13 Kawassang | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 9 | 5 | 8 | 13 | 6 | 6 | 12 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 31 | |
| 10 | SDN. 14 Makaranganan | 12 | 5 | 17 | 11 | 11 | 22 | 11 | 9 | 20 | 8 | 5 | 13 | 7 | 9 | 16 | 13 | 9 | 22 | 62 | |
| 11 | SDN. 15 Marabatuang | 6 | 3 | 9 | 8 | 3 | 11 | 3 | 6 | 9 | 5 | 8 | 13 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 11 | 30 | |
| 12 | SDN. 16 Sailus Kecil | 13 | 9 | 22 | 13 | 11 | 24 | 20 | 15 | 35 | 8 | 13 | 21 | 5 | 12 | 17 | 13 | 14 | 27 | 72 | |
| 13 | SDN. 17 Pelokang | 6 | 3 | 9 | 5 | 7 | 12 | 3 | 4 | 7 | 10 | 5 | 15 | 9 | 7 | 16 | 6 | 5 | 11 | 39 | |
| 14 | SDN. 18 Tinggalungan | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 12 | 9 | 4 | 13 | 3 | 12 | 15 | 28 | |
| 15 | SDN. 21 Kapoposang Bali | 19 | 10 | 29 | 18 | 10 | 28 | 8 | 8 | 16 | 10 | 10 | 20 | 8 | 1 | 9 | 15 | 16 | 31 | 78 | |
| 16 | SDN. 23 Matalaang | 22 | 26 | 48 | 24 | 22 | 46 | 11 | 13 | 24 | 18 | 32 | 50 | 19 | 30 | 49 | 27 | 21 | 48 | 121 | 1 |
| 17 | SDN. 24 Kembang Lemari | 16 | 10 | 26 | 16 | 20 | 36 | 21 | 20 | 41 | 15 | 18 | 33 | 12 | 15 | 27 | 16 | 15 | 31 | 96 | |
| 18 | SDN. 25 Makarangana | 6 | 5 | 11 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 8 | 10 | 1 | 11 | 2 | 6 | 8 | 30 | |
| 19 | SDN. 26 Sapinggang | 7 | 7 | 14 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 10 | 8 | 18 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 10 | 30 | |
| 20 | SDN. 27 Sanane | 21 | 15 | 36 | 11 | 11 | 22 | 14 | 14 | 28 | 10 | 11 | 21 | 15 | 17 | 32 | 2 | 17 | 19 | 73 | |
| 21 | SDN. 28 Sapuka | 16 | 10 | 26 | 12 | 6 | 18 | 11 | 11 | 22 | 28 | 27 | 55 | 12 | 13 | 25 | 15 | 18 | 33 | 94 | |
| 22 | SDN. 29 Sailus Besar | 18 | 10 | 28 | 10 | 14 | 24 | 31 | 17 | 48 | 32 | 16 | 48 | 11 | 17 | 28 | 13 | 9 | 22 | 115 | |
| 23 | SDN. 30 Satanger | 16 | 15 | 31 | 20 | 15 | 35 | 8 | 12 | 20 | 18 | 15 | 33 | 10 | 13 | 23 | 14 | 29 | 43 | 86 | |
| 24 | SDN. 31 Balo-Baloang Caddi | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
| 25 | SDN. 32 Kawassang | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 10 | 11 | |
| 26 | SDN. 33 Lilikang | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | 9 | 3 | 8 | 11 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 9 | 26 | |
| 27 | SDN. 34 Pamolikang | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 10 | 18 | |
| Jumlah | | 293 | 215 | 508 | 270 | 255 | 525 | 257 | 242 | 499 | 325 | 285 | 610 | 245 | 271 | 516 | 264 | 278 | 542 | 1654 | 15 |

Pulau Sapuka, 14 Maret 2017

Kepala UPTD Pendidikan Kec. Lk. T

SURIADI, S.Pd.,M.M

Nip. 19690605 199303 1 011

**DATA KEBUTUHAN KEKURANGAN GURU PNS SMP
SE KECAMATAN LIUKANG TANGAYA TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

| NO | NAMA SEKOLAH | TAHUN PENDIRIAN | JMLH SISWA | KEBUTUHAN | | | | | | | | | | | | | | YANG ADA | | | | | | | | | | | | | | KEKURANGAN | | | | | | | | | | | | | | KELE | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-------------|----------|--------------|----------|----------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------|-----|-----------|-----|-----|-----|
| | | | | KS | PPKn | PAI | Bhs. Indo | Mtm | IPA | IPS | Seni Budaya | PJOK | Bhs. Inggris | BK | TIK | Bhs. Daerah | JMLH | KS | PPKn | PAI | Bhs. Indo | Mtm | IPA | IPS | Seni Budaya | PJOK | Bhs. Inggris | BK | TIK | Bhs. Daerah | JMLH | KS | PPKn | PAI | Bhs. Indo | Mtm | IPA | IPS | Seni Budaya | PJOK | Bhs. Inggris | BK | TIK | Bhs. Daerah | JMLH | KS | PPKn | PAI | Bhs. Indo | Mtm | IPA | IPS |
| 1 | SMPN. 1 Liukang Tangaya | 1983 | 239 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 32 | | | | | | | | | | | |
| 2 | SMPN. 2 Satap Liukang Tangaya | 2008 | 59 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | | | | | | | | | |
| 3 | SMPN. 3 Satap Liukang Tangaya | 2010 | 128 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | | | | | | | | | |
| 4 | SMPN. 4 Satap Liukang Tangaya | 2010 | 84 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | | | | | | | | | | |
| 5 | SMPN. 5 Satap Liukang Tangaya | 2010 | 63 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 1 | | | | | | | | | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | | | | | | | | | | |
| 6 | SMPN. 6 Satap Liukang Tangaya | 2012 | 71 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 1 | | | | | | | | | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | | | | | | | | | | |
| 7 | SMPN. 7 Satap Liukang Tangaya | 2012 | 38 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 1 | | | | | | | | | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | | | | | | | | | | |
| 8 | SMPN. 8 Satap Liukang Tangaya | 2012 | 60 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 1 | | | | | | | | | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | | | | | | | | | | |
| 9 | SMPN. 9 Satap Liukang Tangaya | 2013 | 49 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | | | | | | | | | | |
| 10 | SMPN. 10 Satap Liukang Tangaya | 2013 | 66 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 1 | | | | | | | | | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | | | | | | | | | |
| 11 | SMPN. 11 Satap Liukang Tangaya | 2013 | 67 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 1 | | | | | | | | | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | | | | | | | | | |
| 12 | SMPN. 12 Satap Liukang Tangaya | 2013 | 32 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 1 | | | | | | | | | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | | | | | | | | | |
| 13 | SMPN. 13 Satap Liukang Tangaya | 2014 | 36 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | 992 | 13 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 39 | 38 | 38 | 39 | 37 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39 | 39 | 462 | | | | | | |

Catatan :

| Keadaan | KS | PPKn | PAI | Indo | Mtm | IPA | IPS | Seni | PJOK | Ingg | BK | TIK | B.Dae | JMLH |
|--------------|----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|----|-----|-------|------|
| - Kebutuhan | 13 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 481 |
| - Yang ada | 12 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | 19 |
| - Kekurangan | 1 | 39 | 38 | 38 | 39 | 37 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39 | 39 | 462 |

Pulau Sapuka, 30 Juli

Kepala UPTD

SURIADI, S.Pd., MM

NIP. 19690605 1993



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 2 Lt. 4, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 117, Faks. 0411 424 568

<http://www.universitaspbosowa.ac.id>

Nomor : A. 317/FKIP/UNIBOS/VII/2017

Makassar, 4 Juli 2017

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada

Yth. : Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Pangkep

di -

Tempat

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini akan melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian studi Program S1.

Nama : Askar Purwanto

NIM : 4512103101

Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Universitas Bosowa

Judul Penelitian :

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ANAK PUTUS SEKOLAH
DI KELURAHAN SAPUKA KECAMATAN LIUKANG TANGAYA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melaksanakan penelitian.

Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami sampaikan banyak terima kasih.



Tembusan:

1. Rektor Universitas Bosowa
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Sultan Hasanuddin ☎0410) 21200 Ext 146 Pangkajene

Pangkajene, 17 Juli 2017

Nomor : 070/Albo /VII/ KKBP /2017
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth . Kepada,
1. Bapak Sekda Kab. Pangkep
2. Kepala Bappeda Kab. Pangkep
Masing-Masing
Di-

Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bosowa Makassar Nomor:A.317/FKIP/UNIBOS/VII/2017 Tanggal: 04 Juli 2017 Perihal Izin Penelitian, maka disampaikan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : ASKAR PURWANTO
NIM : 4512103101
Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

Bermaksud akan melakukan Penelitian di Instansi Bapak, dengan judul :

"ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ANAK PUTUS SEKOLAH DI KELURAHAN SAPUKA KECAMATAN LIUKANG TANGAYA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN"

Penelitian dilaksanakan selama 3 (Tiga) Bulan tanggal: 18 Juli s/d 20 Juli 2017

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (Dua) exemplar copy hasil "PENELITIAN" kepada Bupati Pangkep Cq. Kepala Kantor Kesbangpol dan Balitbangda.
5. Surat ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan selanjutnya,-



9601110 198101 1 005

TEMBUSAN : Kepada Yth

1. Bupati Pangkep di Pangkajene;
2. Kepala Balitbangda Kab. Pangkep di Pangkajene;
3. Dekan Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bosowa Makassar di Makassar;

Sdr(i) ASKAR PURWANTO;

----- *Pertinggal* -----



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KECAMATAN LIUKANG TANGAYA**

Alamat : Jl Pendidikan Pulau Sapuka Kec. Liukang Tangaya 90673

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 070/ 76/KLT / IX/ 2017

Camat Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, berdasarkan surat Dekan Fak. Keguruan dan Pendidikan Universitas Bosowa Makassar Nomor: A.317/FKIP/UNIBOS/VII/2017, dengan ini menyatakan bahwa yang di bawah ini;

Nama : Askar Purwanto
NIM : 4512103101
PRODI : Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

Benar telah melakukan penelitian untuk kepentingan penyusunan Skripsi dengan;

Judul : **"ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ANAK PUTUS SEKOLAH DI KECAMATAN LIUKANG TANGAYA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN"**.

Lokasi : Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di: Pangkep

Pada tanggal , 5 September 2017

Mengetahui,

Camat Liukang Tangaya



Askar Purwanto, S.Sos, M.Si

NIP. 19710810 199303 1 010

RIWAYAT HIDUP



Askar Purwanto , anak dari pasang Nyonya Hapipa dan Tuan Nurdin, lahir pada tanggal 10 April 1994 di pulau Sapuka Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, penulis lahir dan dibesarkan orang tuanya hanya bekerja sebagai nelayan. Penulis pernah bersekolah di SDN 4 Sapuka, SMPN1 Liukang Tangaya, SMAN 1 Liukang Tangaya, dan lanjut di universitas Bosowa Makassar pada tahun 2012, dan pada tahun ini pula penulis memulai kehidupan barunya di kota makassa, dimana penulis dulunya tidak tau apa-apa kini sudah bisa bersaing dengan yang lainnya. Dimana pada masa dunia kampus penulis sangat senang dengan dunia dunia barunya dalam Organisasi, penulis pernah masuk pada organisasi intara kampus, dan ekstera kampus. Diantaranya organisasi yang pernah penulis geluti HMJ PGSD Universitas Bosowa, BEM FKIP Universitas Bosowa, HMI Cabang Makassar, MAPALA 45, HIMALAYA, IPPM Pangkep, GAPEMNAS, JARINGAN KEMANUSIAAN hingga sampai pada Organisasi Sosisal dan Gerakan. Banyak hal yang Menjadi pelajaran selama penulis bergelut di dunia Organisasi Mahasiswa dan Masyarakat, yang paling berkesan selama ini persahabatan, persaudaraan, dan pengetahuan yang Penulis dapatkan, adalah hal yang tidak bisa didapatkan di bangku perkuliahan, kecuali di dalam dunia organisasi saja.

Dengan motivasi tinggi untuk semakin keras dalam belajar sehingga penulis dapat menyelesaikan pengajaran tugas akhir skripsi ini. Sehingga harapan penulis Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata dari Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terealisasinya skripsi yang berjudul **Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.**

